PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



Alamat: Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri,
Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211
Telepon: (0721) 489813 Faksmile : +62 721 476054
Email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

INOVASI



Alamat: Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri,
Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211
Telepon: (0721) 489813 Faksmile : +62 721 476054
Email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id



DRS. H. HELMY THOHIR, M.H.

KETUA PTA BANDAR LAMPUNG



DR. H. KHAERUDIN, S.H., M.HUM.
WAKIL KETUA PTA BANDAR LAMPUNG

HAKI M TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG






HAKI M TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG















KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2022. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan rekam jejak yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terutama terkait munculnya Covid-19 pada tahun 2020 mempercepat proses transformasi dari Peradilan Konfensional ke Peradilan Moderen di Wilaya Pengadilan Tginggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama Sewialayah Pengadilan Tinggi Agama Badnar Lampung. Pelaksanan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampungyang di atur oleh undang-undang. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan menggambarkan kondisi Peradilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bidang Teknis Yustisial, Administrasi Perkara, Kesektariatan serta bidang Pembinaan dan Pengawasan, Akreditasi Penjaminan Mutu pada akhir laporan dimuat kesimpulan dan Rekomendasi.

Keseluruhan kegiatan yang di laksanakan oleh pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam rangka mendukung Program Peradilan moderen yang di gadang-gadang Mahkamah Agung dan merupakan amanat yang tertuang dalam cetak buku pembinaan peradilan 2010-2035 implementasi dari pradilan moderen ini telah dimualai sejalan peluncuran aplikasi e-court pada tahun 2018 yang lalu dan hingga saat ini terus melakukan perbaikan terhadapa sarana dan prasarana IT serta ketersedaian SDM yang handal

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Lapaoran Pelaksanaan Kegiatan ini masih banyak kekurangan isi maupun sistematika penulisan, untuk itu saran dan kritik sebagai bahan perbaikan di masa yang akan dating sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga kerja keras kita selama ini dapat dicatat sebagai salah satu untuk pengabdian dari tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini dan dapat menjawab kepentingan institusi dan public dalam rangka transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandarlampung, 16 Januari 2023
Ketua,

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.
NIP. 19571121 198403 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II KEADAAN PERKARA 13

A. Keadaan Perkara Peradilan Agama 13

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 15
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 17
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjaauan Kembali (PK) 19

B. Penyelesaian Perkara 21

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 23
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 25
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) 33
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 27
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 27

C. Pengelolaan/Realisasi Dipa 04 Pradilan Agama 27

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) 27
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 28
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 30
4. Sidang Terpadu 32

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA 34

A. Sumber Daya Manusia 34

1. Mutasi 42
2. Promosi 44
3. Pensiun 45
4. Diklat 46

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 48

A. Pengelolaan Keuangan 48

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 55

C. Pengelolaan Teknologi Informasi 74
1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Agama 74
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama 17
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 82
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 82
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 83
C. Inovasi Pelayanan Publik 87
BAB VI PENGAWASAN 97
A. Pengawasan Internal 97
B. Evaluasi 101
BAB VII PENUTUP 110
A. Kesimpulan 110
B. Rekomendasi 110

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan salah satu institusi yang merupakan kawal depan *(Voor Post)* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Propinsi Lampung berdasarkan pasal 49,51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi. wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi Lampung yang terdiri dari 15 (Lima Belas) wilayah Kabupaten/Kota, yang telah memiliki Pengadilan Agama baru 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA
2. Pengadilan Agama Metro kelas IA
3. Pengadilan Agama Kalianda kelas IB
4. Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas IB
5. Pengadilan Agama Tanggamus kelas IB
6. Pengadilan Agama Kotabumi kelas II
7. Pengadilan Agama Tulang Bawang kelas II
8. Pengadilan Agama Blambangan Umpu kelas II
9. Pengadilan Agama Krui di Liwa kelas II
10. Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II
11. Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II
12. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II
13. Pengadilan Agama Sukadana Kelas II
14. Pengadilan Agama Mesuji Kelas II

Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat masih mengikuti Pengadilan Agama Krui.

Dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang notabene merupakan perwujudan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Mahkamah Agung RI mencanangkan “Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia” yang kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi yang merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Tiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah :1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target pada tahun 2022 pada masing-masing indikator.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan- perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

A. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah

1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.Karena itu, fokus perubahan

reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Perubahan mental aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah dilakukan secara terstruktur sejak dicanangkan Pembangunan Zona Integritas pada Mei 2019. Melalui pembangunan di Area I (Manajemen Perubahan) pembangunan pola pikir dan budaya kerja terus dilakukan diseluruh bagian hingga unit terkecil. Sehingga mulai terlihat diseluruh bagian untuk memenuhi tuntutan layanan birokrasi yang serba cepat, penuh keramah tamahan dan sarat dengan inovasi mulai tercipta. Dengan demikian dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak lagi terlihat cerminan citra birokrasi yang negatif;

2. Pengawasan

   Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan.Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan, karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Untuk melaksanakan pengawasan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar lampung melalui pembangunan Area 5 Zona Integritas telah melakukan berbagai langkah pembangunan yang terstruktur dan berkesinambungan baik pengawasan internal maupun eksternal dalam Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun pengawasan pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung. Diarea ini pun lahir sebuah inovasi yang mendukung tugas pengawasan yaitu e-binwas dimana seluruh laporan hasil pengawasan dan laporan tindak lanjutnya terdokumentasi pada aplikasi tersebut;

3. Akuntabilitas

   Kemampuan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu

menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Penguatan pembangunan akutanbilitas pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilakukan selaras dengan pembangunan Area 4 pembangunan Zona Integritas. Dimana seluruh program dan anggaran yang disusun berorientasi pada hasil. Selain itu, penyusunan dan penilaian Laporan akuntabilitas kinerja PTA dan PA sewilayah PTA Bandar Lampung telah memedomani regulasi terbaru yaitu Permenpan Nomor 88 tahun 2021.

4. Kelembagaan

   Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Struktur kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung seiring dengan perbaikan struktur organisasi Lembaga diatasnya karena untuk saat ini pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung belum mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan struktur kelembagaan. Namun demikian mulai terlihat langkah langkah perubahan struktur kearah struktur Lembaga yang lebih efektif dimulai dari pemisahan panitera dan sekretaris melalui PERMA Nomor 7 tahun 2015, selain itu mulai tahun 2020 penerimaan CPNS sudah langsung mencantumkan jabatan fungsional tertentu. Dimana hal ini merupakan salah satu upaya peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan perpanjangan tangan dari negara dan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur.Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Perbaikan tatalaksana dilakukan seiring dengan pembangunan Zona integritas dalam Area II Zona Integritas (Penataan Tatalaksana) dalam area ini penertiban berbagai standar prosedur pelayanan telah ditertibkan dan diformalkan dalam bentuk SOP. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sekaligus merubah mental aparatur. Hasil dari pembangunan area II (dua) ini sangat terlihat dengan munculnya inovasi kebijakan siperading dan inovasi aplikasi barcode Salinan putusan.

6. SDM Aparatur

   Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Pembangunan sumberdaya manusia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sudah seharusnya menjadi perhatian bersama. Terkait pembangunan SDM yang dalam area pembangunan Zona Integritas berada dalam Area 3 (tiga), penataan manajemen sumberdaya manusia dimana didalamnya meliputi perekrutan, pengembangan karir, Hak dan Kewajiban serta pola promosi dan mutasi yang semuanya sangat berpengaruh terhadap lahirnya SDM yang kompeten.

7. Peraturan Perundang-Undangan

   Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,

disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan penguatan terhadap sistem peraturan perundang- undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Pelayanan Publik

   Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang dalam pembangunan Zona Integritas berada pada area 6, Adapun hasil yang dicapai dalam rangka pembangunan area 6 diantaranya pelatihan hospitality untuk para petugas PTSP yang membekali para petugas layanan garis depan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mampu memberikan layanan yang ramah dan berkelas dunia. Beberapa inovasi yang muncul sebagai bukti pembangunan di area ini adalah lahirnya SI Budi (sistim buku tamu digital) dan e barcode yang merupakan inovasi untuk brosur digital.

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam buku cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035, secara ideal badan peradilan yang agung adalah badan peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif danberkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan; dan
10. Modern dengan berbasis Teknologi InformasiTerpadu.

Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/ 2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah AgungRI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2011 Tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;dan
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/ 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 834/SEK/SK/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024

Selanjutnya Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se- Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/ SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepatwaktu;
2. Manajemen informasipublik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi dipengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;
6. Implementasi SIPP Plus guna otomatisasi PolaBindalmin;
7. “Justice for All” dengan paket kegiatan:
    a. Pelayanan Perkara Prodeo
    b. Pelayanan Sidang Keliling
    c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
8. Pengawasan.

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI, secara umum gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi/ lembaga kepemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan menjadikan dan memperhatikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung.

B. Progres Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

1. Visi Dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah “Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung”. Sedangkan Misi yang dilaksanakan yakni :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai

supporting unit seluruh kegiatan pelaksanaan peradilan.

2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2020-2024. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU.

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dilaksanakanlah review terhadap IKU Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

3. Rencana Strategis

Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai berikut :

a. Bidang Teknis Yustisial
   1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga teknis (Hakim,Panitera/Panitera Pengganti,Jurusita/Jurusita Pengganti) secara berkelanjutan;dan
   2. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara.

b. Bidang Non Teknis Yustisial
   1. Melaksanakan Manajemen Peradilan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
   2. Memanfaatkan akses perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

c. Bidang Administrasi Umum

1. Meningkatkan Pelaporan Keuangan dan asset dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Mahkamah Agung RI ; dan
2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan input data melalui aplikasi SIKEP, ABS, SAPK, KOMDANAS, SIMAK-BMN, RKA-KL, SAIBA, JDIH, dll;
3. Mengoptimalkan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007;
4. Peningkatan sarana Teknologi Informasi;
5. Peningkatan sarana meliput Pembangunan/perluasan gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
6. Membuka akses Teknologi Informasi dengan program Finger Scan, Touch Screen, dan Hot Spot.
7. Melaksanakan rapat rutin pada setiap unit kerja.

Tujuan Rencana Strategis adalah:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama & badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas;
4. Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Tenaga Teknis yang berkualitas, dan professional;
6. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan Peradilan Agama; dan
7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi peradilan agama.

Tabel 1.2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	
			2020	2021
		a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%

		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi dan - PK	100%	100%
		c. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	90%	92%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%
		b. Persentase berkas register dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
		a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	81%	82%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	94%	95%	96%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

5. CAPAIAN KINERJA

Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung selalu

berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik demi mewujudkan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung serta Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandarlampung. Ini terlihat dari prestasi-prestasi yang telah dicapai selama tahun 2022. Diantara prestasi yang diperoleh adalah:

1. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berhasil mempertahankan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).
2. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berhasil meraih Penghargaan Peringkat I Kategori Satker Besar Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	16	0	3	16
2.	Masuk Tahun ini	2179	157	8	2336
3.	Putus	2107	155	11	2262
4.	Sisa Tahun ini	88	2	0	90
B.	**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	4	0	4	4
2.	Masuk Tahun ini	695	75	3	770
3.	Putus	681	75	3	756
4.	Sisa Tahun ini	18	0	4	18
C.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	2661	537	1	3198
3.	Putus	2658	531	1	3189
4.	Sisa Tahun ini	3	6	0	9
D.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	14	0	0	14
2.	Masuk Tahun ini	2318	185	3	250
3.	Putus	2326	184	3	2510
4.	Sisa Tahun ini	6	1	0	7
E.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	12	0	0	12
2.	Masuk Tahun ini	1092	123	0	1215
3.	Putus	1066	119	0	1185
4.	Sisa Tahun ini	38	4	0	42
F.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	22	0	1	22
2.	Masuk Tahun ini	1085	270	0	1355
3.	Putus	1083	267	1	1350
4.	Sisa Tahun ini	24	3	0	27
G.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II**				

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
1.	Sisa Tahun Lalu	5	0	0	5
2.	Masuk Tahun ini	654	128	0	782
3.	Putus	655	128	0	783
4.	Sisa Tahun ini	4	0	0	4
H.	**PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	1	0	1	1
2.	Masuk Tahun ini	598	172	0	770
3.	Putus	598	172	1	770
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
I.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	4	0	0	4
2.	Masuk Tahun ini	658	61	0	719
3.	Putus	659	61	0	720
4.	Sisa Tahun ini	3	0	0	3
J.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	12	0	0	12
2.	Masuk Tahun ini	831	54	1	885
3.	Putus	833	54	1	887
4.	Sisa Tahun ini	10	0	0	10
K.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	15	0	0	15
2.	Masuk Tahun ini	901	47	0	948
3.	Putus	885	47	0	932
4.	Sisa Tahun ini	31	0	0	31
L.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	5	0	0	5
2.	Masuk Tahun ini	371	135	0	506
3.	Putus	366	135	0	501
4.	Sisa Tahun ini	10	0	0	10
M.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	1	0	0	1
2.	Masuk Tahun ini	641	225	0	866
3.	Putus	633	225	0	858
4.	Sisa Tahun ini	9	0	0	9
N.	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	11	0	0	11
2.	Masuk Tahun ini	2591	186	4	2777
3.	Putus	2588	186	3	2774
4.	Sisa Tahun ini	14	0	1	14

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	63	0	0	63
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	23	0	0	23
3.	Putus	23	0	0	23
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	4	0	0	4
3.	Putus	4	0	0	4
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
D.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	8	0	0	8
3.	Putus	8	0	0	8
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
E.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	5	0	0	5
3.	Putus	5	0	0	5
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
F.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	5	0	0	5
3.	Putus	5	0	0	5
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

H.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	4	0	0	4
3.	Putus	4	0	0	4
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
M.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
N.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
O.	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	11	0	0	11
3.	Putus	11	0	0	11
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.

Tabel 2.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	6	0	0	6
2.	Masuk Tahun ini	8	0	0	8
3.	Putus	8	0	0	8
4.	Sisa Tahun ini	6	0	0	6
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
D.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	2	0	0	2
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	2	0	0	2
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
E.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
F.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
H.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	1	0	0	1
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
M.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
N.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
O.	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	2	0	0	2
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	2	0	0	2

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Tabel 2.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	1	0	0	1
2.	Masuk Tahun ini	2	0	0	2
3.	Putus	2	0	0	2
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
D.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
E.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
F.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
H.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
M.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
N.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
O.	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I**				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di Provinsi Lampung dalam menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2022 telah melaksanakan mekanisme penerimaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam penerimaan perkara banding Tahun 2022 tersebut baik Pembanding maupun Terbanding ada yang menerapkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1947, dimana Pembanding dapat mengajukan Memori Banding dan Terbanding juga mengajukan kontra memori bandingnya.

Pada Tahun 2022 ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang diterima sebanyak 63 perkara banding dengan perincian sebagai berikut :

1. Cerai Talak	=	17	perkara
2. Cerai Gugat	=	28	perkara
3. Harta Bersama	=	6	perkara
4. Waris	=	8	perkara
5. Derden Verzet	=	1	perkara
6. Pembatalan Nikah	=	1	perkara
7. Ekonomi Syariah	=	2	perkara
8. Lain – lain	=	0	perkara
Jumlah	**=**	**63**	**perkara**

Dari 63 perkara tersebut keseluruhannya telah diputus pada tahun ini, sehingga tidak ada sisa perkara. Berdasarkan pendaftaran perkara banding, maka pengadilan agama yang mengajukan perkara banding sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) perkara banding yang meliputi :
    a. cerai talak 9 (sembilan) perkara
    b. cerai gugat 8 (delapan) perkara

c. harta bersama 2 (dua) perkara
d. ekonomi syariah 1 (satu) perkara
e. warisan 4 (empat) perkara

2. Pengadilan Agama Metro sebanyak 4 (empat) perkara yang meliputi:
   a. cerai talak 1 (satu) perkara
   b. cerai gugat 1 (satu) perkara
   c. waris 1 (satu) perkara
   d. derden verzet 1 (satu) perkara
3. Pengadilan Agama Kalianda sebanyak 5 (lima) perkara yakni ;
   a. cerai talak 2 (dua) perkara
   b. cerai gugat 2 (dua) perkara
   c. pembatalan nikah 1 (satu) perkara
4. Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 5 (lima) perkara yakni :
   a. cerai gugat 3 (tiga) perkara
   b waris 1 (satu) perkara
   c. harta bersama 1 (satu) perkara
5. Pengadilan Agama Gunung Sugih sebanyak 8 (delapan) perkara yakni :
   a. cerai gugat 2 (dua) perkara
   b. cerai talak 3 (tiga) perkara
   c. ekonomi syariah 1 (satu) perkara
   d. waris 1 (satu) perkara
6. Pengadilan Agama Gedong Tataan sebanyak 1 (satu) perkara yakni :
   a. cerai gugat (satu) perkara
7. Pengadilan Agama Pringsewu 4 (empat) perkara yakni :
   a. cerai gugat 3 (tiga) perkara
   b. harta bersama 1 (satu) perkara
8. Pengadilan Agama Tulang Bawang 1 (satu) perkara yakni ;
   a. cerai gugat 1 (satu) perkara
9. Pengadilan Agama Sukadana 11 (sebelas) perkara yakni :
   a. cerai talak 2 (dua) perkara
   b. cerai gugat 7 (tujuh) perkara
   c. harta bersama 2 (dua) perkara
10. Pengadilan Agama Blambangan Umpu 1 (satu) perkara yakni ;
    a. cerai gugat 1 (satu) perkara

Sedangkan untuk Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Krui dan Pengadilan Agama Mesuji pada tahun 2022 ini tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Agamanya.

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Tabel 2.5. Sisa Perkara yang Diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	0	0	0	0
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	0	0	0	0
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	16	0	3	16
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	16	0	3	16
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	4	0	4	4
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	4	0	4	4
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
D.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	0	0	0	0
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	0	0	0	0
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
E.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	14	0	0	14
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	14	0	0	14
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
F.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	12	0	0	12
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	12	0	0	12
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	22	0	1	22
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	22	0	1	22
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
H.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	5	0	0	5
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	5	0	0	5
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	1	0	1	1
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	1	0	1	1
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	4	0	0	4
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	4	0	0	4
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	12	0	0	12
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	12	0	0	12
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	O
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I**				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	15	0	0	15
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	15	0	0	15
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
M.	PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	5	0	0	5
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	5	0	0	5
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
N.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	1	0	0	1
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	1	0	0	1
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0
O.	PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	11	0	0	11
2.	Sisa perkara tahun sebelumya yang diputus Tahun 2022	11	0	0	11
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2022	0	0	0	0

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada (empat) Lingkungan Peradilan Tanggal 13 Maret 2014, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melakukan monitoring terhadap perkara yang yang berjalan agar dapat diputus tepat waktu sebagai mana yang telah ditetapkan tersebut. Berikut adalah data perkara yang diputus berdasarkan waktu penyelesaian perkara :

Tabel 2.6. Jumlah Perkarayang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN
		TAHUN 2022

		Putus s.d. 3 bulan	Diputus 3-5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PTA BANDAR LAMPUNG	63	0	0	
2.	PA TANJUNG KARANG	2169	89	4	
3.	PA METRO	270	53	1	
4.	PA GUNUNG SUGIH	3118	71	0	
5.	PA KALIANDA	2443	64	3	
6.	PA TANGGAMUS	1083	102	0	
7.	PA KOTABUMI	1257	93	0	
8.	PA TULANG BAWANG	758	25	0	
9.	PA KRUI	732	38	0	
10.	PA BLAMBANGAN UMPU	678	42	0	
11.	PA GEDONG TATAAN	831	55	1	
12.	PA PRINGSEWU	867	63	2	
13.	PA MESUJI	465	36	0	
14.	PA TULANG BAWANG TENGAH	815	43	0	
15.	PA SUKADANA	2683	90	1	

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK.

Tabel 2.7. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA			
		PUTUS	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
1	2	3	4	5	6
1.	PTA BANDAR LAMPUNG	63	-	**14**	-
2.	PA TANJUNG KARANG	2273	23	8	2
3.	PA METRO	759	4	1	0
4.	PA GUNUNG SUGIH	3217	8	1	1
5.	PA KALIANDA	2513	5	1	0
6.	PA TANGGAMUS	1185	0	0	0
7.	PA KOTABUMI	1351	5	1	0
8.	PA TULANG BAWANG	783	1	0	0
9.	PA KRUI	770	0	0	0
10.	PA BLAMBANGAN UMPU	720	1	0	0

11.	PA GEDONG TATAAN	876	1	0	0
12.	PA PRINGSEWU	932	4	0	0
13.	PA MESUJI	501	0	0	0
14.	PA TULANG BAWANG TENGAH	857	0	0	0
15.	PA SUKADANA	2777	11	2	0

4. JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL MEDIASI.

Tabel 2.8.Jumlah Perkara yang Berhasil Mediasi.

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA			
		YANG DIMEDIASI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	GAGAL
1	2	3	4	5	6
1.	PA TANJUNG KARANG	330	81	235	3
2.	PA METRO	85	3	82	0
3.	PA GUNUNG SUGIH	174	96	68	10
4.	PA KALIANDA	173	33	139	1
5.	PA TANGGAMUS	132	46	86	0
6.	PA KOTABUMI	132	84	34	14
7.	PA TULANG BAWANG	62	17	45	0
8.	PA KRUI	36	3	32	1
9.	PA BLAMBANGAN UMPU	50	7	43	0
10.	PA GEDONG TATAAN	87	31	49	7
11.	PA PRINGSEWU	88	15	73	0
12.	PA MESUJI	36	3	29	4
13.	PA TULANG BAWANG TENGAH	54	30	23	1
14.	PA SUKADANA	196	59	125	12

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, **pengertian diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga perkara anak melalui diversi bukan kewenangan Pengadilan Agama.

C. PENGELOLAAN/REALISASI DIPA 04 PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG.

1. POSBAKUM

Pada tahun 2022 sebanyak sembilan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mendapatkan alokasi dana Posbakum. DIPA 04-Badilag yang dialokasikan untuk Posbakum di Pengadilan Agama tersebut telah terserap sebesar 99.6% yakni

dari Total Pagu Rp.601.575.000,- telah terealisasi sebesar Rp.599.304.800,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Posbakum

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERKARA
1	2	3	4	5	6
1.	PA TANJUNG KARANG	50.000.000	49.200.000	800.000	1257
2.	PA METRO	45.000.000	44.900.000	100.000	304
3.	PA GUNUNG SUGIH	49.775.000	49.775.000	0	973
4.	PA KALIANDA	50.000.000	49.740.000	260.000	1341
5.	PA TANGGAMUS	41.800.000	41.599.800	200.200	733
6.	PA KOTABUMI	50.000.000	50.000.000	0	1033
7.	PA TULANG BAWANG	40.000.000	39.700.000	300.000	782
8.	PA KRUI	40.000.000	40.000.000	0	461
9.	PA BLAMBANGAN UMPU	50.000.000	50.000.000	0	460
10.	PA GEDONG TATAAN	30.000.000	29.700.000	300.000	270
11.	PA PRINGSEWU	30.000.000	29.890.000	110.000	516
12.	PA MESUJI	45.000.000	44.900.000	100.000	322
13.	PA TULANG BAWANG TENGAH	40.000.000	40.000.000	0	459
14.	PA SUKADANA	40.000.000	39.900.000	100.000	603

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU.

Salah satu peningkatan pelayanan sidang yang telah terealisasi oleh seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu. Di tahun 2022 terdapat 2100 perkara yang disidangkan di luar gedung Pengadilan yakni meliputi 21 lokasi. Berikut adalah pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung :

Tabel 2.10. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
I	**Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	0
2	Besaran Pagu	0
3	Jumlah Realisasi Anggaran	0
4	Jumlah Perkara	0

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
II	**Pengadilan Agama Metro Kelas I A**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	0
2	Besaran Pagu	0
3	Jumlah Realisasi Anggaran	0
4	Jumlah Perkara	0
III	**Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	50
2	Besaran Pagu	205.930.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	205.930.000
4	Jumlah Perkara	850
IV	**Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	62
2	Besaran Pagu	201.960.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	201.772.900
4	Jumlah Perkara	848
V	**Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	12
2	Besaran Pagu	71.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	71.500.000
4	Jumlah Perkara	123
VI	**Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	21
2	Besaran Pagu	103.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	103.500.000
4	Jumlah Perkara	167
VII	**Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	9
2	Besaran Pagu	75.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	75.000.000
4	Jumlah Perkara	34
VIII	**Pengadilan Agama Krui Kelas II**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	26
2	Besaran Pagu	101.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	101.000.000
4	Jumlah Perkara	339

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
IX	**Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	32
2	Besaran Pagu	157.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	157.500.000
4	Jumlah Perkara	556
X	**Pengadilan Agama Gedong Tataan**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	7
2	Besaran Pagu	44.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	43.700.000
4	Jumlah Perkara	42
XI	**Pengadilan Agama Pringsewu**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	9
2	Besaran Pagu	22.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	22.000.000
4	Jumlah Perkara	73
XII	**Pengadilan Agama Mesuji**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	9
2	Besaran Pagu	22.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	22.500.000
4	Jumlah Perkara	106
XIII	**Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	13
2	Besaran Pagu	22.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	22.500.000
4	Jumlah Perkara	320
XIV	**Pengadilan Agama Sukadana**	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung	42
2	Besaran Pagu	60.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	60.000.000
4	Jumlah Perkara	414

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Dalam mewujudkan "*Justice for All"* dengan sasaran masyarakat yang kurang mampu tetap dapat merasakan pelayanan hukum di Pengadilan secara cuma-cuma, Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah merealisasikan anggaran DIPA 04-Badilag untuk Alokasi Perkara Prodeo sebesar 97.75% dari total pagu Rp. 179.700.000,00. Berikut adalah rincian realisasi anggaran DIPA 04-Badilag alokasi untuk Perkara Prodeo.

Tabel 2.11. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Perkara Prodeo

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
I	**Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**	
1	Besaran Pagu	20.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	17.659.500
3	Jumlah Perkara	50
II	**Pengadilan Agama Metro Kelas I A**	
1	Besaran Pagu	4.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	3.200.000
3	Jumlah Perkara	10
III	**Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B**	
1	Besaran Pagu	10.500.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	10.255.000
3	Jumlah Perkara	30
IV	**Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B**	
1	Besaran Pagu	20.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	20.000.000
3	Jumlah Perkara	50
V	**Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B**	
1	Besaran Pagu	6.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	6.000.000
3	Jumlah Perkara	15
VI	**Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II**	
1	Besaran Pagu	16.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	16.000.000
3	Jumlah Perkara	34
VII	**Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II**	
1	Besaran Pagu	12.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	12.000.000
3	Jumlah Perkara	30
VIII	**Pengadilan Agama Krui Kelas II**	
1	Besaran Pagu	7.500.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	7.500.000
3	Jumlah Perkara	15
IX	**Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II**	
1	Besaran Pagu	12.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	12.000.000
3	Jumlah Perkara	30
X	**Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II**	
1	Besaran Pagu	12.000.000
2	Revisi Pagu	11.700.000

3	Jumlah Realisasi Anggaran	11.680.000
4	Jumlah Perkara	62
XI	**Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II**	
1	Besaran Pagu	16.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	16.000.000
3	Jumlah Perkara	40
XII	**Pengadilan Agama Mesuji Kelas II**	
1	Besaran Pagu	16.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	15.950.000
3	Jumlah Perkara	48
XIII	**Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II**	
1	Besaran Pagu	12.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	12.000.000
3	Jumlah Perkara	30
XIV	**Pengadilan Agama Sukadana Kelas II**	
1	Besaran Pagu	16.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	15.420.000
3	Jumlah Perkara	39

4. SIDANG TERPADU

Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah merealisasikan anggaran DIPA 04-Badilag untuk Alokasi Sidang Terpadu sebesar 75,4 % dari total pagu Rp.56.000.000,00 dan Sisa Anggaran sebesar Rp.13.800.000,00 Berikut adalah rincian realisasi anggaran DIPA 04-Badilag alokasi untuk Sidang Terpadu.

Tabel 2.11. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Perkara Prodeo

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
I	**Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
II	**Pengadilan Agama Metro Kelas I A**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
III	**Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
IV	**Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B**	

1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
V	**Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
VI	**Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II**	
1	Besaran Pagu	25.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	13.800.000
3	Jumlah Perkara	35
VII	**Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II**	
1	Besaran Pagu	15.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	15.000.000
3	Jumlah Perkara	15
VIII	**Pengadilan Agama Krui Kelas II**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
IX	**Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
X	**Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II**	
1	Besaran Pagu	0
2	Revisi Pagu	0
3	Jumlah Realisasi Anggaran	0
4	Jumlah Perkara	0
XI	**Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
XII	**Pengadilan Agama Mesuji Kelas II**	
1	Besaran Pagu	16.000.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	16.000.000
3	Jumlah Perkara	18
XIII	**Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0
XIV	**Pengadilan Agama Sukadana Kelas II**	
1	Besaran Pagu	0
2	Jumlah Realisasi Anggaran	0
3	Jumlah Perkara	0

BAB III

Manajemen Sumber Daya Manusia

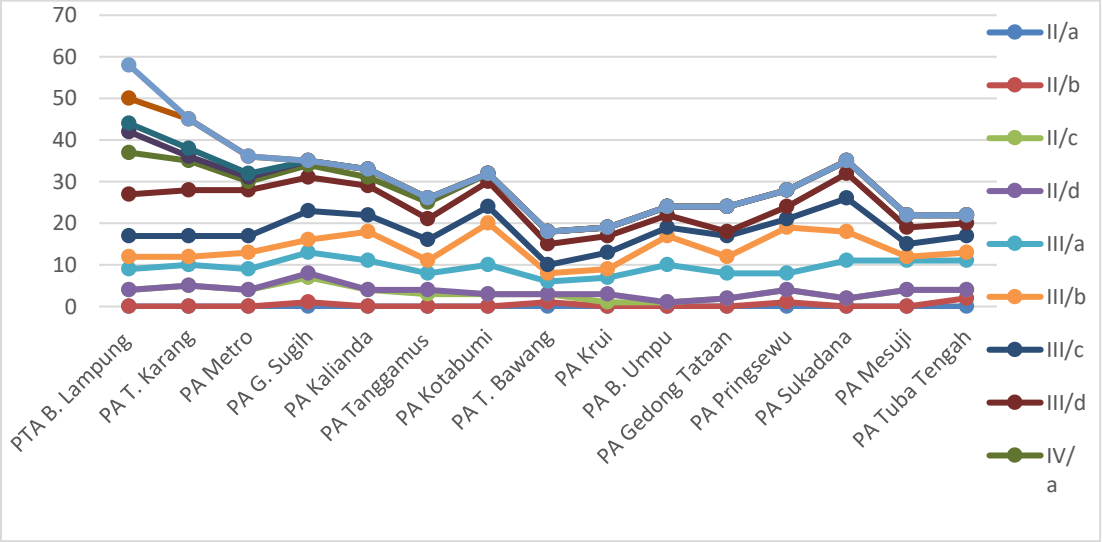
Pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bertransformasi dari pengelola administratif kepegawaian menjadi rekan strategis organisasi yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja dan visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dengan Total **457** Sumber Daya Manusia di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Agama terus meningkatkan pelayanan berbasis kinerja yang dilakukan dengan penyusunan Peran dan Hasil. Adapun Komposisi SDM berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

3.1. Komposisi SDM Berdasarkan beberapa Kriteria

3.1.a. Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN RUANG												
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PTA Bandar Lampung	-	-	4	-	5	3	5	10	10	5	2	6	8
2	PA Tanjung Karang Kelas I A	-	-	5	-	5	2	5	11	7	1	2	7	-
3	PA Metro Kelas I A	-	-	4	-	5	4	4	11	2	1	1	4	-
4	PA Gunung Sugih Kelas I B	-	1	6	1	5	3	7	8	3	1	-	-	-
5	PA Kalianda Kelas I B	-	-	4	-	7	7	4	7	2	2	-	-	-
6	PA Tanggamus Kelas I B	-	-	3	1	4	3	5	5	4	1	-	-	-
7	PA Kotabumi Kelas II	-	-	3	-	7	10	4	6	2	-	-	-	-
8	PA Tulang Bawang Kelas II	-	1	2	-	3	2	2	5	3	-	-	-	-
9	PA Krui Kelas II	-	-	1	2	4	2	4	4	2	-	-	-	-
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	-	-	1	-	9	7	2	3	2	-	-	-	-
11	PA GedongTataan Kelas II	-	-	2	-	6	4	5	1	6	-	-	-	-
12	PA Pringsewu Kelas II	-	1	3	-	4	11	2	3	4	-	-	-	-
13	PA Sukadana Kelas II	-	-	2	-	9	7	8	6	3	-	-	-	-
14	PA Mesuji Kelas II	-	-	4	-	7	1	3	4	3	-	-	-	-
15	PA T. Bawang Tengah Kelas II	-	2	2	-	7	2	4	3	2	-	-	-	-
JUMLAH		0	5	46	4	87	68	64	87	55	11	5	17	8
		457												

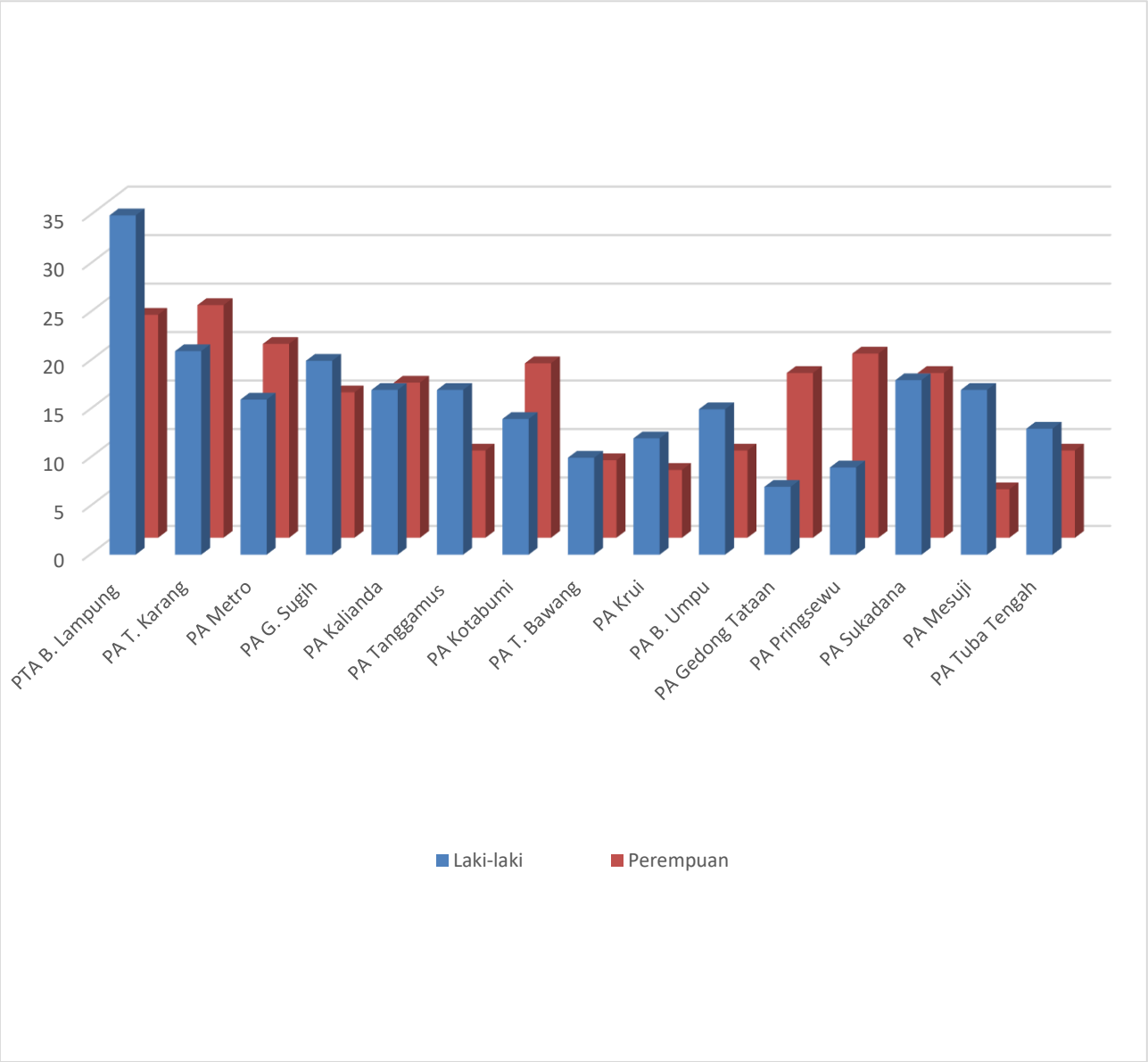


3.1.b. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1. Sumber Daya Manusia di PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	PTA Bandar Lampung	58	35	23
2	PA Tanjung Karang Kelas IA	45	21	24
3	PA Metro Kelas IA	36	16	20
4	PA Gunung Sugih Kelas IB	35	20	15
5	PA Kalianda Kelas IB	33	17	16
6	PA Tanggamus Kelas IB	26	17	9
7	PA Kotabumi Kelas II	32	14	18
8	PA Tulang Bawang Kelas II	18	10	8
9	PA Krui Kelas II	19	12	7
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	24	15	9
11	PA GedongTataan Kelas II	24	7	17
12	PA Pringsewu Kelas II	28	9	19
13	PA Sukadana Kelas II	35	18	17
14	PA Mesuji Kelas II	22	17	5
15	PA Tulang Bawang Tengah Kelas II	22	13	9
JUMLAH		**457**	**241**	**216**
			457	

Data Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampug dapat pula dilihat pada grafik berikut :

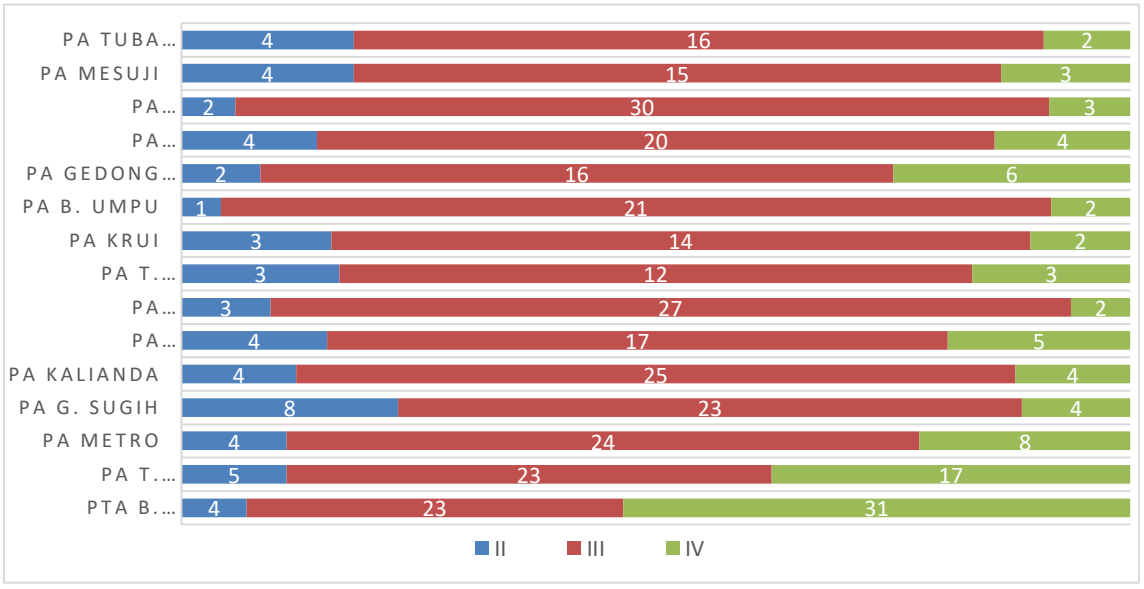


Gambar 3.1. Grafik SDM di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan golongan ruang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No.	Satuan Kerja	Golongan Ruang		
		II	III	IV
1	2	3	4	5
1	PTA Bandar Lampung	4	23	31
2	PA Tanjung KarangKelas I A	5	23	17
3	PA Metro Kelas I A	4	24	8
4	PA Gunung SugihKelas I B	8	23	4
5	PA Kalianda Kelas I B	4	25	4
6	PA Tanggamus Kelas I B	4	17	5
7	PA Kotabumi Kelas II	3	27	2
8	PA Tulang Bawang Kelas II	3	12	3
9	PA Krui Kelas II	3	14	2
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	1	21	2
11	PA Gedong Tataan Kelas II	2	16	6
12	PA Pringsewu Kelas II	4	20	4
13	PA Sukadana Kelas II	2	30	3
14	PA Mesuji Kelas II	4	15	3
15	PA Tulang Bawang Tengah Kelas II	4	16	2
JUMLAH		55	306	96
		457		

Dalam bentuk grafik data disajikan sebagai berikut.

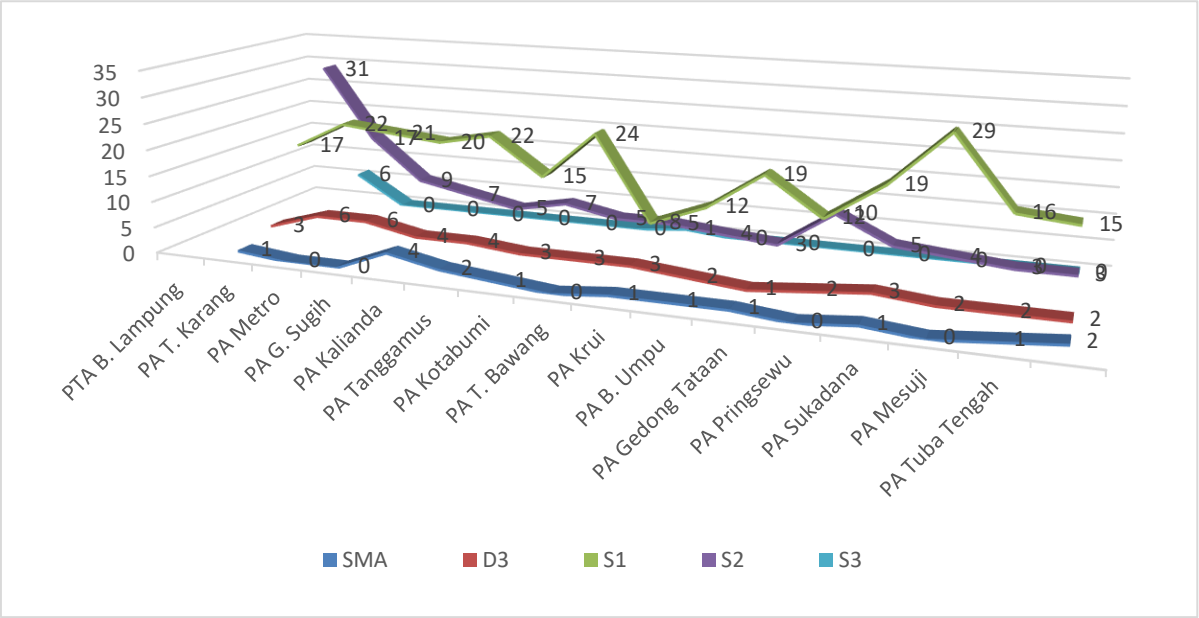


Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung disajikan dalam data berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sumber Daya Manusia di PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalamWilayah Hukum PTA Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	SATUAN KERJA	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PTA Bandar Lampung	-	-	1	3	17	31	6
2	PA Tanjung KarangKelas I A	-	-	-	6	22	17	-
3	PA Metro Kelas I A	-	-	-	6	21	9	-
4	PA Gunung SugihKelas I B	-	-	4	4	20	7	-
5	PA Kalianda Kelas I B	-	-	2	4	22	5	-
6	PA Tanggamus Kelas I B	-	-	1	3	15	7	-
7	PA Kotabumi Kelas II	-	-	-	3	24	5	-
8	PA Tulang Bawang Kelas II	-	-	1	3	8	5	1
9	PA Krui Kelas II	-	-	1	2	12	4	-
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	-	-	1	1	19	3	-
11	PA Gedong Tataan Kelas II	-	-	-	2	12	10	-
12	PA Pringsewu Kelas II	-	-	1	3	19	5	-
13	PA Sukadana Kelas II	-	-	-	2	29	4	-
14	PA Mesuji Kelas II	-	-	1	2	16	3	-
15	PA Tulang Bawang Tengah Kelas II	-	-	2	2	15	3	-
JUMLAH		**0**	**0**	**15**	**46**	**271**	**183**	**7**
		457						

Berdasarkan tingkat pendidikan jika disajikan ke dalam gambar grafik, maka akan Nampak sebagai berikut.



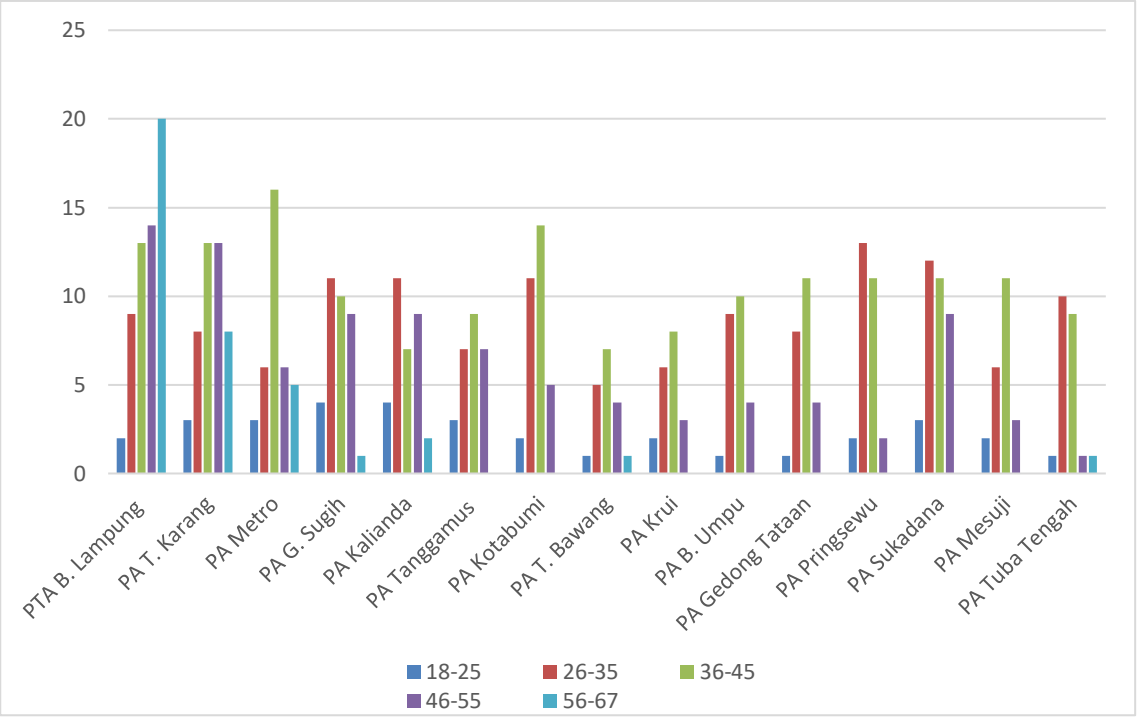
Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Sumber Daya Manusia di PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalamWilayah Hukum PTA Bandar Lampung Berdasarkan Usia

NO.	SATUAN KERJA	USIA				
		18-25	26-35	36-45	46-55	56-67
1	2	3	4	5	6	7
1	PTA Bandar Lampung	2	9	13	14	20
2	PA TanjungKarangKelas I A	3	8	13	13	8
3	PA Metro Kelas I A	3	6	16	6	5
4	PA GunungSugihKelas I B	4	11	10	9	1
5	PA KaliandaKelas I B	4	11	7	9	2
6	PA TanggamusKelas I B	3	7	9	7	-
7	PA KotabumiKelas II	2	11	14	5	-
8	PA TulangBawangKelas II	1	5	7	4	1
9	PA KruiKelas II	2	6	8	3	-
10	PA BlambanganUmpuKelas II	1	9	10	4	-
11	PA GedongTataanKelas II	1	8	11	4	-
12	PA PringsewuKelas II	2	13	11	2	-
13	PA SukadanaKelas II	3	12	11	9	-

14	PA Mesuji Kelas II	2	6	11	3	-
15	PA TulangBawang Tengah Kelas II	1	10	9	1	1
JUMLAH		34	132	160	93	38
		457				

Berikut data disajikan dalam bentuk grafik.

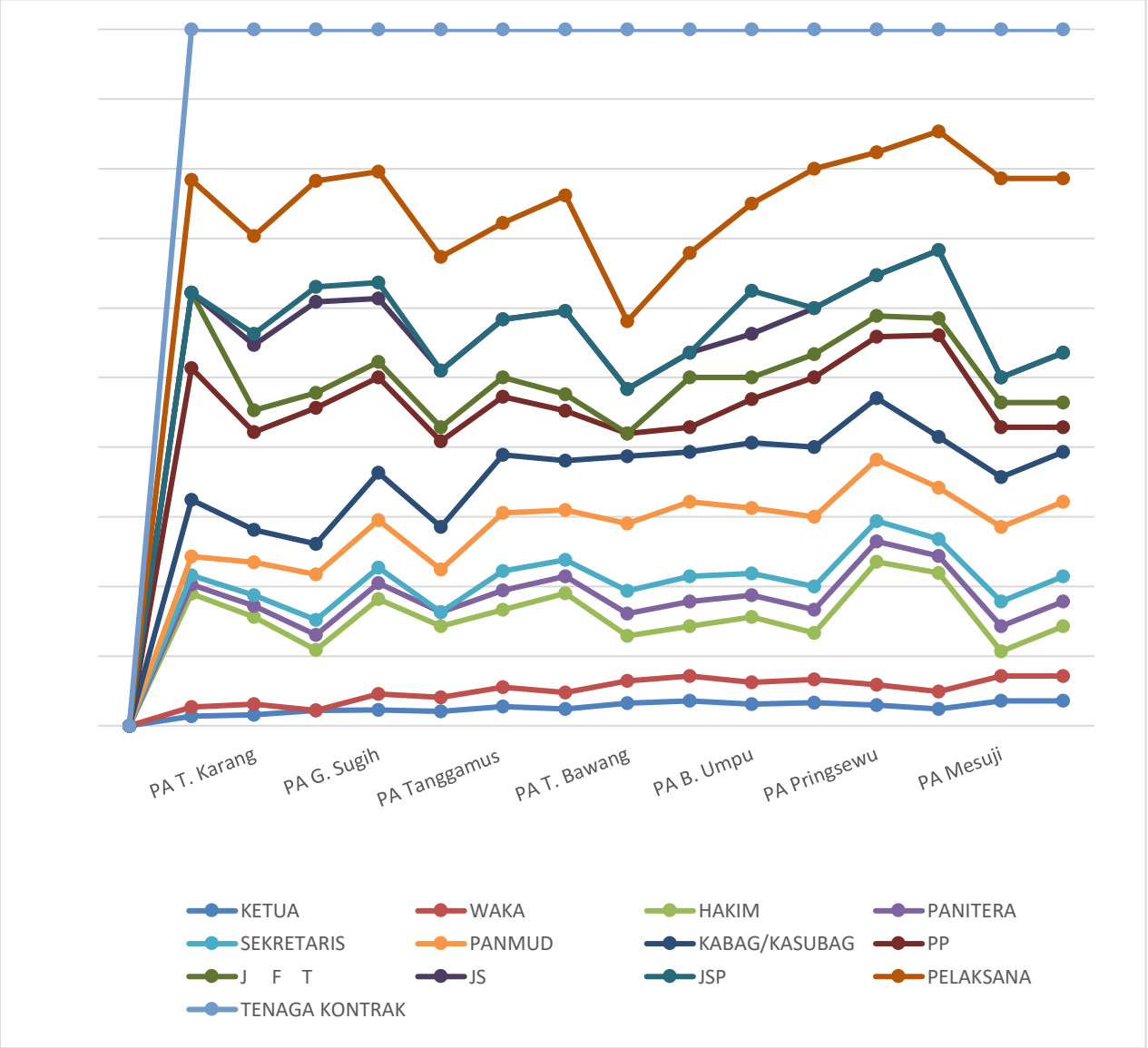


Berdasarkan jabatan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada formasi pelaksana dinilai tidak sesuai dengan beban kerja yang ada bahkan di beberapa Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak memiliki pelaksana sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Adapun data jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.5. Sumber Daya Manusia di PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalamWilayah Hukum PTA Bandar Lampung Berdasarkan Jabatan

NO.	SATUAN KERJA	JABATAN												
		KETUA	WAKA	HAKIM	PANITERA	SEKRETARIS	PANMUD	KASUBAG/ KABAG/	PP	JS	JSP	JFT	PELAKSANA	TENAGA KONTRAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PTA Bandar Lampung	1	1	12	1	1	2	6	14	8	-	-	12	16
2	PA TanjungKarangKelas I A	1	1	8	1	1	3	3	9	2	6	1	9	19
3	PA Metro Kelas I A	1	-	4	1	1	3	2	9	1	6	1	7	10
4	PA GunungSugihKelas I B	1	1	6	1	1	3	3	6	1	4	1	7	9
5	PA KaliandaKelas I B	1	1	5	1	-	3	3	6	1	4	-	8	16
6	PA TanggamusKelas I B	1	1	4	1	1	3	3	3	1	3	-	5	10
7	PA KotabumiKelas II	1	1	6	1	1	3	3	3	1	5	-	7	10
8	PA TulangBawangKelas II	1	1	2	1	1	3	3	1	-	2	-	3	13
9	PA KruiKelas II	1	1	2	1	1	3	2	1	2	1	-	4	9
10	PA BlambanganUmpuKelas II	1	1	3	1	1	3	3	2	1	2	2	4	8
11	PA GedongTataanKelas II	1	1	2	1	1	3	3	3	1	2	-	6	6
12	PA PringsewuKelas II	1	1	6	1	1	3	3	3	1	2	-	6	6
13	PA SukadanaKelas II	1	1	7	1	1	3	3	6	1	4	-	7	6
14	PA Mesuji Kelas II	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	-	8	6
15	PA TulangBawang Tengah Kelas II	1	1	2	1	1	3	2	1	1	2	-	7	6
JUMLAH		15	14	70	15	14	44	44	69	23	44	5	100	150
		457												**150**

Data SDM berdasarkan jabatan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



1. MUTASI

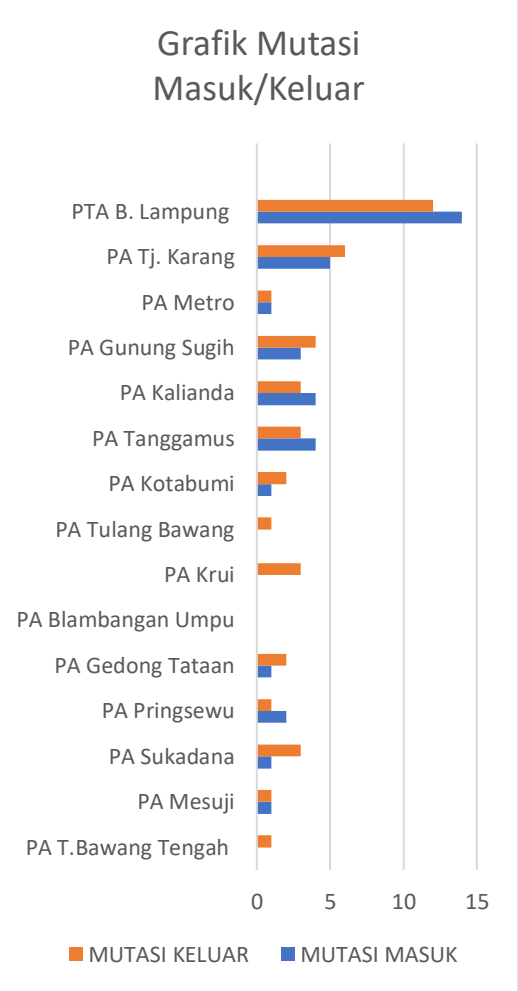
Mutasi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar yang merupakan perpindahan pegawai antar satuan kerja sewilayah Indonesia maupun mutasi dalam yang merupakan perpindahan pegawai dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2022. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3.6. Mutasi Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung Tahun 2022

Dalam bentuk grafik data disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.6. Mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	DATA MUTASI	
		MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR
1	2	3	4
1	PTA Bandar Lampung	14	12
2	PA Tanjung Karang Kelas IA	5	6
3	PA Metro Kelas IA	1	1
4	PA Gunung Sugih Kelas IB	3	4
5	PA Kalianda Kelas IB	4	3
6	PA Tanggamus Kelas IB	4	3
7	PA Kotabumi Kelas II	1	2
8	PA Tulang Bawang Kelas II	0	1
9	PA Krui Kelas II	0	3
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	0	0
11	PA Gedong Tataan Kelas II	1	2
12	PA Pringsewu Kelas II	2	1
13	PA Sukadana Kelas II	1	3
14	PA Mesuji Kelas II	1	1
15	PA Tulang Bawang Tengah Kelas II	0	1
JUMLAH		37	43
		135	



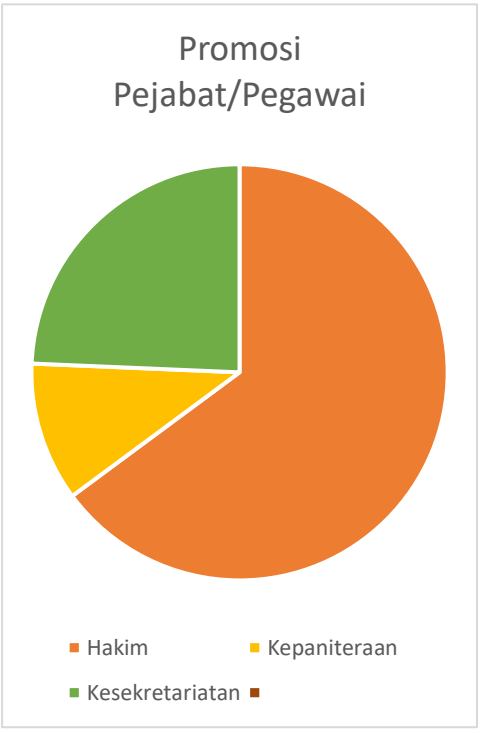
MUTASI DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	**56**

2. PROMOSI

Promosi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada Tahun 2022 berjumlah 75 orang, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.7. Promosi Pejabat/Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	HAKIM	KEPANITERAAN/KEJURUSITAAN	KESEKRETARIATAN
1	2	3	4	5
1	PTA Bandar Lampung	3	1	1
2	PA Tanjung Karang Kelas I A	1	2	0
3	PA Metro Kelas I A	2	0	1
4	PA Gunung Sugih Kelas I B	6	3	1
5	PA Kalianda Kelas I B	7	1	2
6	PA Tanggamus Kelas I B	8	0	2
7	PA Kotabumi Kelas II	7	0	3
8	PA Tulang Bawang Kelas II	0	1	0
9	PA Krui Kelas II	3	0	0
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	1	0	2
11	PA Gedong Tataan Kelas II	3	0	1
12	PA Pringsewu Kelas II	4	0	2
13	PA Sukadana Kelas II	3	0	0
14	PA Mesuji Kelas II	0	0	2
15	PA Tulang Bawang Tengah Kelas II	1	0	1
JUMLAH		48	8	18
		75		



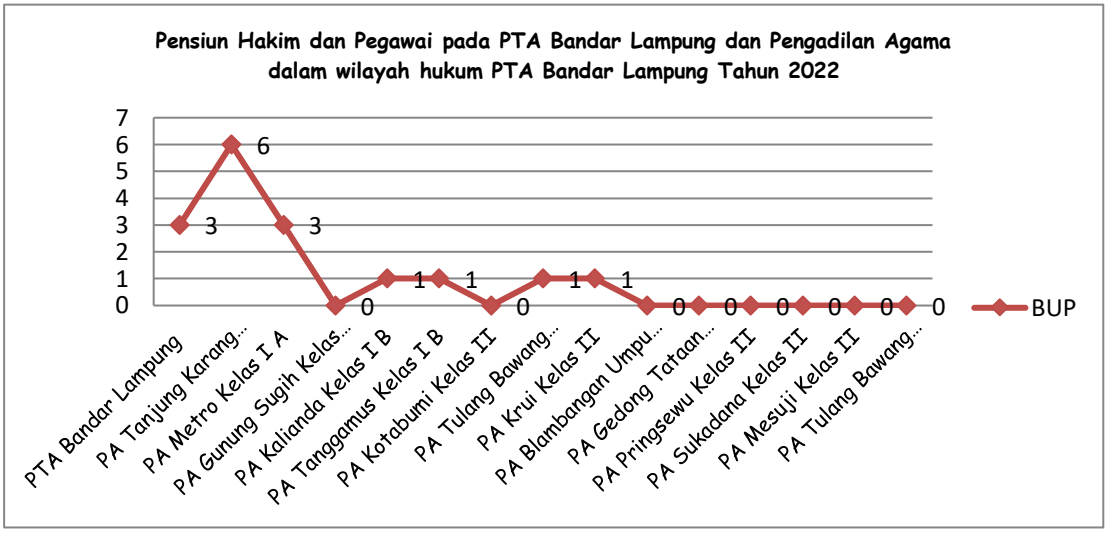
3. PENSIUN

Data Hakim dan Pegawai yang pensiun pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2022 tercatat berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pensiun Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	PENSIUN 2022
		BUP
1	2	5
1	PTA Bandar Lampung	3
2	PA TanjungKarangKelas I A	0
3	PA Metro Kelas I A	0
4	PA GunungSugihKelas I B	0
5	PA KaliandaKelas I B	0
6	PA TanggamusKelas I B	1
7	PA KotabumiKelas II	0
8	PA TulangBawangKelas II	0
9	PA KruiKelas II	0
10	PA BlambanganUmpuKelas II	0
11	PA GedongTataanKelas II	0
12	PA PringsewuKelas II	0
13	PA SukadanaKelas II	1
14	PA Mesuji Kelas II	0
15	PA TulangBawang Tengah Kelas II	0
JUMLAH		**5**

Data pensiun tahun 2022 disajikan dalam diagram sebagai berikut.



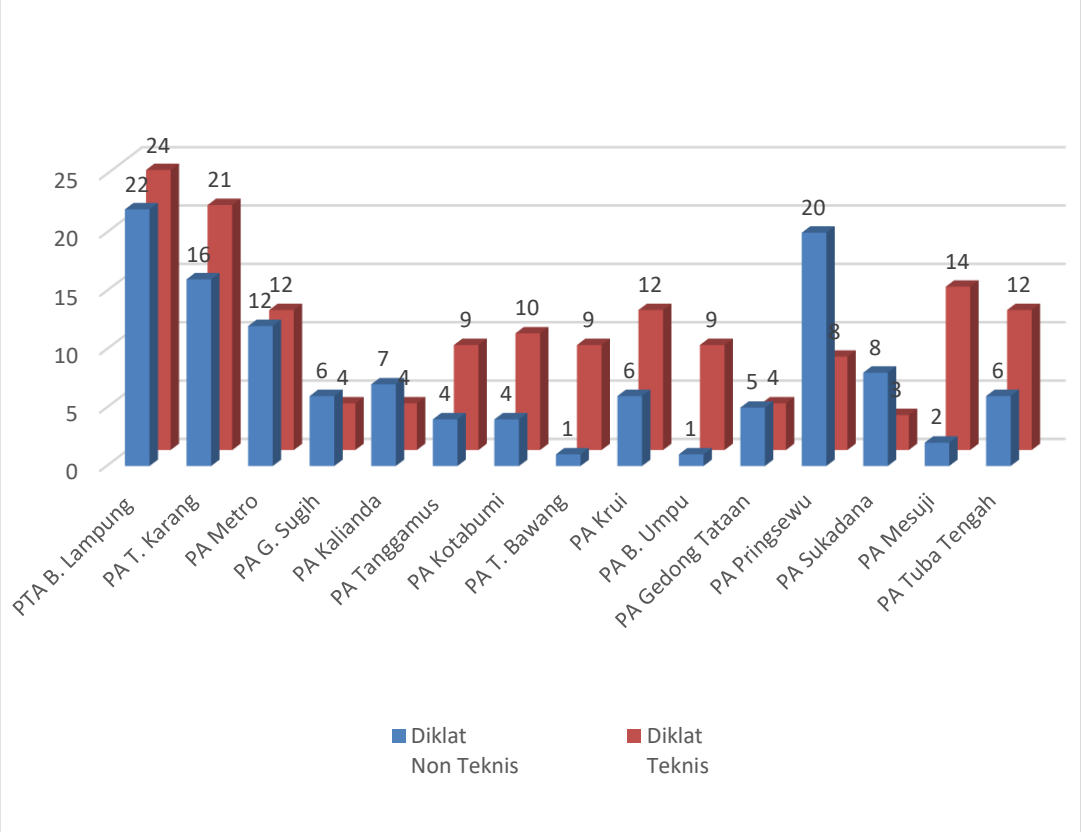
4. DIKLAT

NO.	SATUAN KERJA	DIKLAT	
		TEKNIS	NON TEKNIS
1	2	3	4
1	PTA Bandar Lampung	22	24
2	PA TanjungKarangKelas I A	16	21
3	PA Metro Kelas I A	12	12
4	PA GunungSugihKelas I B	6	4
5	PA KaliandaKelas I B	7	4
6	PA TanggamusKelas I B	4	9
7	PA KotabumiKelas II	4	10
8	PA TulangBawangKelas II	1	9
9	PA KruiKelas II	6	12
10	PA BlambanganUmpuKelas II	1	9
11	PA GedongTataanKelas II	5	4
12	PA PringsewuKelas II	20	8
13	PA SukadanaKelas II	8	3
14	PA Mesuji Kelas II	2	14
15	PA TulangBawang Tengah Kelas II	6	12
JUMLAH		**120**	**155**
		275	

Hakim dan Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2022 berjumlah 275 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9. Diklat yang diikuti Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung Tahun 2022

Data dalam grafik tersaji sebagai berikut.



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Berikut ini adalah rekapitulasi realisasi anggaran belanja teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun anggaran 2022 :

Tabel 4.1. Matriks Realisasi Anggaran Belanja Non Teknis DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2022 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	11,245,559,000	11,156,634,323	99.21	88,196,953	0.79	
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	3,391,025,000	3,367,803,324	99.32	23,221,676	0.68	
	1066.EBA.051	Belanja Barang Non Operasional	279,884,000	278,833,400	99.62	1,050,600	0.38	
II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	118,000,000	117,920,000	99.93	80,000	0.07	
	1071.EBB.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkatoran	68,000,000	67,999,710	100	290	0	
		JUMLAH	**15,102,468,000**	**14,989,190,757**	**99.25**	**113,277,243**	**0.75**	
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	7,179,192,000	5,816,992,678	81.03	1,362,199,322	18.97	
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	1,783,751,000	1,755,823,090	98.43	27,927,910	1.57	
	1066.EBA.051	Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	5,000,000	100	0	0.00	
,II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EAD.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171,000,000	171,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**9,138,943,000**	**7,748,815,768**	**84.79**	**1,390,127,232**	**15.21**	
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	4.317.533.000	4.028.655.446	93,31	288.877.554	6,69	
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	1.281.860.000	1.243.728.291	97,03	38.131.709	2,97	
II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1071.EAD.001	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	64.000.000	63.916.000	99,87	84.000	0,13	
	1071.EAD.002	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	20.000.000	20.000.000	100	0	0.00	
	1071.EAD.003	Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan	30.000.000	30.800.000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**5.718.393.000**	**5.391.294.737**	**94.28**	**327.098.263**	**5,72**	
D.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	2.937.347.000	2.810.288.345	95.67	127.058.655	4.33	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1.136.624.000	1.135.307.592	99.88	1.313.408	0.12	
II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.052	Belanja Modal Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	77.500.000	77.420.000	99.90	80.000	0.10	
	1071.EBB.053	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Pengadaan Sarana Disabilitas)	10.000.000	10.000.000	100	0	0.00	
	1071.EBB.051	Belanja Modal Pembangunan/renovasi Gedung Pengadilan (Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan)	40.000.000	40.000.000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**4.201.471.000**	**4.073.018.937**	**96.94**	**128.452.063**	**3.06**	
E.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	3,791,991,000	3,364,714,696	88.73	427,276,304	11.27	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1.240.301.000	1,228,558,147	99.05	11,742,853	0.9	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EAE.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	734,000,000	732,927,750	99.85	1,072,250	0.14	
		JUMLAH	**5,801,292,000**	**5,361,198,593**	**92.41**	**440,093,407**	**7.59**	
F.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	3.246.295.000	3.039.043.069	93.61	207.251.931	6.39	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1.603.240.000	1.578.318.106	98.44	24.921.894	1.56	
	1066.EBA.051	Belanja Non Operasional	5.000.000	4.999.500	99.99	500	0.01	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	50.500.000	50.420.000	99.84	80.000	0.16	
	1071.EBB.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran / Sarana Disabilitas	20.000.000	20.000.000	100	0	0	
	1071.EBB.051	Renovasi Gedung dan Bangunan / Prasarana Disabilitas	30.000.000	30.000.000	100	0	0	
		JUMLAH	**4.955.035.000**	**4.722.780.675**	**95.31**	**232.254.325**	**4.69**	

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	3,624,271,000	3,521,857,426	97,17	102,413,574	2,83	
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	1,334,368,000	1,314,394,532	98,50	21,943,468	1,50	
	1066.EBA.051	Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	4,965,000	99,30	35,000	0,70	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	23,500,000	22,648,000	96,37	852,000	3,63	
	1071.EBB.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	90,000,000	89,540,000	99,49	460,000	0,51	
	1071.EBB.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	30,000,000	30,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**5,107,139,000**	**4,983,404,958**	**97,58**	**123,734,042**	**2,42**	
H.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	2.226.201.000.	1.915.974.817	86,06	310,226,183	13,94	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1,204,260,000.	1,141,528,812	94.79	62,731,188	5,21	
	1066.EAA.003	Belanja Barang Non Operasional	5.000.000.	5.000.000.	100	0	0.00	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.951	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	321.100.000	315.600.000	98,29	5.500.000	1,71	
		Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	37.000.000	36.720.000	99,24	280.000	0,76	
		Pengadaan Sarana Disabilitas	20.000.000	20.000.000	100	0	0.00	
	1071.EBB.971	Pengadaan Prasarana Disabilitas	30.000.000	30.000.000	100	0	0.00	
		Perbaikan Jaringan Listrik & Air	163.000.000	162,442,950	99,66	557.050	0,34	
		JUMLAH	**4.006.561.000**	**3.627.266.579**	**90,53**	**379.294.421**	**9,47**	
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	2,542,128,000	2,437,802,493	95.90	104,325,507	4,10	
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	1,156,934,000	1,156,303,317	99.95	630,683	0.05	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071 (052)	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	10,000,000	10,000,000	100	0	0.00	
	1071 (053)	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	122,000,000	121,990,000	99.99	10,000	0.01	
		JUMLAH	**3,821,072,000**	**3,726,095,810**	**97.51**	**104,966,190**	**2.49**	
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	2,349,672,000	2,332,955,034	99,29	16.716.966	0.71	

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	1,049,612,000	1,048,421,125	99.89	1,190,875	0.11	
	1066.EBA.051	Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	5,000,000	100	0.00	0.00	
II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	460,000,000	459,920,000	99.99	80.000,00	0.01	
		JUMLAH	**3,864,284,000**	**3,841,296,159**	**99.41**	**17.907.921.00**	**0.49**	
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	3,442,182,000	3,385,451,024	98.35%	56,730,976	1.65	-
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	921,893,000	890,594,457	96.60	31,298,543	3.40	-
II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						-
	1071.EBB	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	24,056,561,000	24,047,397,304	99.96	9,163,696	0.04	-
	1071.EBB.971	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	10,000,000	9,920,000	99.20	80,000	0.80	-
		JUMLAH	**28.420.636.000**	**28.333.362.785**	**98,52**	**97.273.215**	**1,47%**	-
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EBA.001	Belanja Pegawai	3,444,813,000	3,435,707,561	99.70	9,105,439	0.30	
	1066.EBA.002	Belanja Barang Operasional	1,156,429,000	1,111,685,781	96.10	44,743,219	3.90	
	1066.EBA.051	Belanja Barang Non Operasional	2,700,000	2,700,000	100	0	0.00	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EBB.951	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4,069,714,000	4,065,879,760	99.90	3,834,240	0.10	
	1071.EBB.971	Pembangunan /renovasi gedung dan bangunan	5,803,885,000	5,765,024,361	99.70	38,860,639	0.30	
		JUMLAH	**14,477,541,000**	**14,380,997,463**	**99.30**	**96,543,537**	**0.70**	
M.	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	4,164,750,000	4,136,215,219	99,31	28,534,781	0.69	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1,083,077,000	1,056,322,400	97.52	26,754,600	2.48	
	1066.EAC.001	Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	4,880,000	97.60	120,000	2.40	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EAD.001	Pengadaan Meubelair satker baru	1,664,076,000	1,663,966,962	99.99	109,038	0.01	
	1071.EAD.001	Honorarium pokja UKPBJ	6,350,000	3,810,000	60.00	2,540,000	40.00	
	1071.EAD.001	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	10,000,000	9,920,000	99.20	80.000	0.80	
	1071.EAE.001	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	8,533,736,000	8,465,016,544	99.19	68,755,456	0.81	
		JUMLAH	**15,466,989,000**	**15,340,131,125**	**99.18**	**126,857,875**	**0.82**	
N.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH**							

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	2,114,631,000	2,091,052,236	98.88	23,578,764	1.12	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1,150,643,000	1,110,878,175	96.54	39,764,825	3.46	
	1066.EAC.001	Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	5,000,000	100	0	0.00	
II.	**005.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EAD.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.920.000	99,20	80,000	0.80	
	1071.EAE.001	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.055.500.000	20.890.907.088	99,22	164,592,912	0.78	
		JUMLAH	**24.335.774.000**	**24.107.757.499**	**99,06**	**228,016,501**	**0.94**	
O.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI**							
I.	**005.01.WA**	**Program Dukungan Manajemen**						
	1066.EAA.001	Belanja Pegawai	1,957,197,000	1,942,852,825	99.27	189,175	0.73	
	1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	1,174,120,000	1,121,920,818	95.55	52,199,182	4.45	
	1066.EAC.001	Belanja Barang Non Operasional	5,000,000	3,052,000	61.04	1,948,000	38.96	
II.	**005.01.WA**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**						
	1071.EAD.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410,000,000	409,919,914	99,98%	80,086	0.02	
		JUMLAH	**3,546,317,000**	**3,477,745,557**	**98.07**	**68,571,443**	**1.93**	

Tabel 4.2. Matriks Realisasi Anggaran Belanja Teknis DIPA 04 - Badilag Tahun Anggaran 2022 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.AEA.002	Pembinaan Pemeriksaan Yustisial	122,727,000	119,927,500	97.72	2,799,500	2.28	
	1053.AEA.003	Pembinaan dan Pemantauan Layanan Peradilan	132,591,000	129,483,500	97.66	3,107,500	2.34	
	1053.AEF.001	Bimtek/Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP	26,950,000	26,949,652	100	348	100	
	1053.AEF.002	Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	26,950,000	26,423,200	98.05	526,800	1.95	
		JUMLAH	**309,218,000**	**302,783,852**	**97,92**	**6,434,148**	**2.08**	
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.AEA.001	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara	9,760,000	9,760,000	100	0	0.00	
	1053.QCA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	20,000,000	20,000,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	50,000,000	49,200,000	98.40	800,000	1.60	
		JUMLAH	**79,760,000**	**78,960,000**	**99.00**	**800,000**	**1.00**	

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	3,700,000	3,200,000	86.49	500,000	13.51	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	13,956,000	12,783,600	91.60	1,172,400	8.40	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	45,000,000	44.900,000	99.78	100,000	0.22	
		JUMLAH	**62,656,000**	**60,883,600**	**97.17**	**1,772,400**	**2.83**	
D.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	13,956,000	13,684,600	98.06	271,200	1.94	
	1053.QCA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	6,000,000	6,000,000	100	0	0	
	1053.QCA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	71,500,000	71,500,000	100	0	0	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	41,800,000	41,600,000	99.52	200,000	0.48	
		JUMLAH	**133,256,000**	**132,784,800**	**99.65**	**471,200**	**0.35**	
E.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	37,288,000	36,989,922	99.20	298,078	0.80	
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	10,500,000	10,255,000	97.67	245,000	2.33	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	205,930,000	205,930,000	100	0	0	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	50,000,000	49,775,000	99.55	225,000	0.45	
		JUMLAH	**303,718,000**	**302,949,922**	**99.75**	**768,078**	**0.25**	
F.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.AEA.001	Percepatan Penyelesaian perkara	37,288,000	37,288,000	100	0	0	
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	20,000,000	20,000,000	100	0	0	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	201,960,000	201,772,900	99.91	187,100	0.09	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	50,000,000	49,740,000	99.48	260,000	0.52	
		JUMLAH	**309,248,000**	**308,800,900**	**99.86**	**447,100**	**0.14**	
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QCA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	16,000,000	16,000,000	100	0	0.00	
	1053.AEA.001	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian perkara	37,288,000	37,000,000	99.23	288,000	0.77	
	1053.QCA.002	Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	103,500,000	103,500,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	50,000,000	50,000,000	100	0	0.00	
	1053.QCA.003	Pelayanan Sidang Terpadu	25,000,000	13,800,000	55.20	11,200,000	44.80	
		JUMLAH	**231,788,000**	**220,300,000**	**95.04**	**11,488,000**	**4.96**	
H.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	12,000,000	11,400,000	95.00	600,000	5.00	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	75,000,000	75,000,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	40,000,000	39,996,000	99.99	4,000	0.01	
	1053.QCA.003	Layanan Sidang Isbat Terpadu	15,000,000	15,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**142,000,000**	**141,396,000**	**99.57**	**604,000**	**0.43**	
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	7,500,000	7,500,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	101,000,000	101,000,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	40,000,000	40,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**148,500,000**	**148,500,000**	**100**	**0**	**0,00**	
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	12,000,000	12,000,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	157,500,000	157,500,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	50,000,000	50,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**219,500,000**	**219,500,000**	**100**	**0**	**0.00**	
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	11,700,000	11,680,000	99.83	20.000	0.17	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	44,000,000	43,700,000	99.32	300.000	0.68	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	30,000,000	29,700,000	99.00	300.000	1.00	
		JUMLAH	**85,700,000**	**85,080,000**	**99.28**	**620,000**	**0.72**	
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	16,000,000	15,938,000	99.60	62,000	0.40	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	22,000,000	22,000,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	30,000,000	29,890,000	99.60	110,000	0.40	
		JUMLAH	**68,000,000**	**67,828,000**	**99.70**	**172,00**	**0.30**	
M.	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	37,288,000	37,285,778	99.99	2.222	0.01	
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	15,600,000	15,420,000	98.84	180.000	1.16	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	60,000,000	60,000,000	100	0	0.00	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	40,000,000	35,910,000	99.75	100.000	0.25	
		JUMLAH	**152,888,000**	**152,605,778**	**99.81**	**282.222**	**0.19**	

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
N.	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	11,800,000	11,400,000	96.61	400,000	3.39	
	1053.QBA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	66,100,000	64,440,000	97.49	1,660,000	2.52	
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	40,000,000	40,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**117,900,000**	**115,840,000**	**98.25**	**2,060,000**	**1.75**	
O.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI**							
I.	**005.04.BF**	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**						
	1053.QBA.003	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	45,000,000	44,900,000	99.78	100,000	0.22	
	1053.QCA.001	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	17,200,000	17,180,000	99.88	20,000	0.12	
	1053.QCA.002	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	22,500,000	22,500,000	100	0	0.00	
	1053.QCA.003	Layanan Sidang Terpadu	16,000,000	16,000,000	100	0	0.00	
		JUMLAH	**100,700,000**	**100,580,000**	**99.88**	**120,000**	**0.12**	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Berikut ini adalah rekap pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun Anggaran 2021 :

Tabel 4.2. Matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

A. PTA Bandar Lampung

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	4	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	1	Baik
7	Ruang Perpustakaan	1	Baik
8	Aula	1	Baik
9	Ruang Server	1	Baik
10	Ruang Bendahara	1	Baik
11	Ruang Kabag Umum Dan Keuangan	1	Baik
12	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	Baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**		
13	Ruang Kasubag Tata Usaha &Rumah Tangga	1	Baik
14	Ruang Kasubag Rencana Program dan Anggaran	1	Baik
15	Ruang Panitera Pengganti	2	Baik
16	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
17	Ruang Pelayanan Hukum	1	Baik
18	Ruang Kasubag Keuangan & Pelaporan	1	Baik
19	Tempat Ibadah	1	Baik
20	Ruang Panmud Banding	1	Baik
21	Ruang Sespri	1	Baik
22	Ruang Rapat	1	Baik
23	Ruang Kepegawaian Dan Perencanaan	1	Baik
24	Ruang Umum	1	Baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung		
1	Mesin Ketik Listrik	2	Baik
2	Mesin Foto Copy Folio	-	-
3	Lemari Besi/Metal	4	3 Baik,1 Rusak ringan
4	Lemari Kayu	30	Baik
5	Rak Kayu	14	Baik
6	Filing Cabinet Besi	21	17 Baik,4 Rusak ringan
7	Brandkas	1	Baik
8	Tabung Pemadam Api	7	Baik
9	CCTV	33	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
13	Mesin Absensi	1	Baik
14	LCD Projector/Infocus	4	Baik
15	Meja Kerja Kayu	130	Baik
16	Kursi Besi/Metal	190	175 Baik,11RR,4RB
17	Kursi Kayu	3	Baik
18	Sice	18	Baik
19	Meja Rapat	13	Baik
20	Meja Komputer	6	Baik
21	Meja Resepsionis	4	Baik
22	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik
23	Alat Pembersih Lainnya	2	Baik
24	AC Window	45	43 Baik,2 RR
25	Televisi	5	Baik
26	Ampifier	3	Baik
27	Loudspeaker	20	Baik
28	Sound System	2	Baik
29	Wireless	3	Baik
30	Microphone	1	Baik
31	Microphone Table Stand	1	Baik
32	Unit Power Suply	13	Baik
33	Audio Mixing Portable	2	Baik
34	Microphone/Wireless Mic	3	Baik
35	Video Mixer	1	Baik
36	Camera Digital	2	Baik
37	Telephone PABX	1	Baik
38	Handy Talky (HT)	2	Baik
39	Facsimile	1	Baik
40	Local Area Network (LAN)	1	Baik
41	Internet	2	Baik
42	Komputer Unit Lainnya	2	Baik
43	P.C. Unit	35	Baik
44	Lap Top	41	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	32 Baik/8 Rb
46	Scanner (Peralatan PC)	4	Baik
47	Server	4	3 Baik, 1 Rb
48	Rak Server	1	Baik
49	Portable generating Set	1	Baik
50	Stationary generating Set	2	Baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung		
60	Sedan	3	Baik
61	Jeep	-	-
62	Station Wagon	1	Baik
63	Mini Bus (Penumpang 14 org Kebawah)	1	Baik
64	Sepeda Motor	2	Baik
65	Mobile File	4	Baik
66	Lemari Display	1	Baik
67	Papan Pengumuman	1	Baik
68	Perkakas Kantor Lainnya	37	Baik
69	Tempat tidur Kayu	3	Baik
70	Kasur/ Springbed	1	Baik
71	Sketsel	3	Baik
72	Meja Makan Kayu	1	Baik
73	Pot Bunga	2	Baik
74	Partisi	2	Baik
75	Nakas	2	Baik
76	Mesin cuci	1	Baik
77	Lemari Es	3	Baik
78	A.C Split	9	Baik
79	Kompor Gas	2	Baik
80	Rice cooker	1	Baik
81	Kitchen Set	3	Baik
82	Portable AC	2	Baik
83	Tiang Bendera	1	Baik
84	Tangga Aluminium	1	Baik
85	Mimbar/Podium	1	Baik
86	Lambang Instansi	1	Baik
87	Karpet	9	Baik
88	Gordyin/Kray	3	Baik
89	DVD Player	2	Baik
90	UPS	5	Baik
91	LCD Monitor	5	Baik
92	Intermedia telephone/Key Telephone	2	Baik
93	Change Over Switch	2	Baik
94	Komputer Jaringan Lainnya		Baik
95	CPU	1	Baik
96	Mixer Audio	1	Baik
97	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
98	Piala	3	Baik
99	Buku Lainnya	137	Baik
100	Alat Musik Modern/Band	1	Baik
101	Lukisan Lainnya	2	Baik
102	Maket Miniatur/Replika	1	Baik
103	Papan Visual/Papan Nama	24	Baik
104	Personal Komputer Lainnya	8/1	Baik
105	Sofware Komputer	3	Baik
106	Proyektor Polaris Cop	1	Baik

Ketera

B. PA Tanjung Karang

I.	Ruangan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	2
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Umum	4
7	Ruang Panitera Pengganti	1
8	Ruang Panitera Muda	3
9	Ruang JS/JSP	1
10	Ruang Kasubbag	3
11	Ruang Server	1
12	Ruang Aula	1

I.	Ruangan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang	
13	Ruang Perpustakaan	1
14	Ruang Mediasi	1
15	Ruang Laktasi	1
16	Ruang Posbakum	1
17	Ruang Arsip	1
18	Ruang Onestop Service	1
19	Ruang Tunggu Sidang	1
20	Ruang WC Umum	3
21	Ruang Bendahara	1
22	Ruang Kesehatan	1
23	Ruang Pantry	1
24	Ruang Ekonomi Syariah	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Agama Tanjung Karang		
1	Komputer PC	55	13 buah dalam kondisi rusak berat (dalam Proses Penghapusan)
2	Laptop	35	5 buah dalam kondisi rusak berat (dalam Proses Penghapusan)
3	Printer	19	1 buah dalam kondisi rusak berat (dalam Proses Penghapusan)
4	Infokus / LCD Proyektor	0	-
5	PABX	1	dalam kondisi rusak berat (dalam Proses Penghapusan)
6	AC	40	5 dalam kondisi rusak berat (dalam Proses Penghapusan)
7	Faximili	1	Dalam kondisi rusak ringan
8	Genset	2	1 dalam kondisi rusak berat
9	TV	5	1 dalam kondisi rusak berat
10	CCTV	2	1 dalam kondisi rusak berat
11	Mesin Antrian	1	1 dalam kondisi rusak berat
12	Equalizer	1	-
13	Load Speaker	8	-
14	Sound System	1	Dalam kondisi rusak berat (dalam proses penghapusan)
15	Warlees	2	t dalam kondisi rusak berat (dalam proses penghapusan)
16	Handy Cam	1	dalam kondisi rusak berat (dalam proses penghapusan)
17	UPS	5	-

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Agama Tanjung Karang		
18	Digital Running Teks	1	dalam kondisi rusak berat
19	LCD Monitor	2	-
20	Audio Converter	1	-
21	Charger	3	-
22	Scanner	5	3 dalam kondisi rusak berat 1 dalam proses penghapusan
23	Server	4	1 unit dalam kondisi rusak berat (dalam proses penghapusan)
24	Router	1	
25	Hub	2	
26	Modem	1	
27	Switch	2	
28	Meja Resepsionis	3	
29	Meja computer	4	
30	Meja rapat	20	18 dalam kondisi rusak berat (dalam proses penghapusan)
31	Meja kerja kayu	33	1 dalam kondisi rusak berat
32	Kursi besi/metal	169	lam kondisi rusak berat dan (21 dalam proses penghapusan)
33	Kursi kayu	24	16 dalam kondisi rusak berat (10 dalam proses penghapusan)
34	Sice	11	9 dalam kondisi rusak berat (dalam proses penghapusan)
35	Komputer Jaringan lainnya	1	Baik
36	Rak Server	1	Baik

C. PA Metro

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan pada PA Metro**	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	2
7	Ruang Perpustakaan	1
8	Ruang Kasubag Perencanaan, ITdan Pelaporan, staf	1
9	Ruang Rapat/ Media Center	1
10	Ruang Mediasi	1
11	Ruang Kasub Umum Dan Keuangan, Bendahara, Staf	1
12	Ruang Panitera Pengganti	1
13	Ruang Panmud Hukum	1
14	Ruang Panmud Gugatan	1
15	Ruang Panmud Permohonan	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan pada PA Metro**	
16	Ruang Penasehat Hukum	1
17	Ruang Laktasi	1
18	Ruang Bermain Anak	1
19	Ruang Tunggu Sidang	1
20	Ruang Reseptionist	1
21	Ruang Kepegawaian dan Ortala dan staf	1
22	Ruang Server	1
23	Ruang JS/JSP	1
24	Ruang Arsip	1
25	Ruang Aula Pertemuan	1
26	Ruang Gudang	1
27	Ruang Pelayanan/ Onestop servis	1
28	Tempat Ibadah	1
29	Ruang Satpam	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Metro**		
1	Portable Generating Set	1	
2	Pompa Air	1	
3	Stasiun Wagon	2	
4	Lemari Besi	5	
5	Lemari Kayu	12	
6	Brandkas	3	
7	Buffet	1	
8	CCTV	10	
9	Alat Detektor barang terlarang/ x ray	1	
12	Mesin Absensi	1	
13	Perkakas Kantor Lainnya	8	
14	Meja kerja Kayu	57	
15	Kursi Besi/ Metal	113	
17	Kursi Kayu	4	
18	Sice	6	
19	Bangku Panjang Besi/ Metal	10	
20	Bangku Panjang Kayu	6	
21	Meja Rapat	1	
22	Tempat Tidur Kayu	1	
24	Meja Resepsionis	2	
30	Kasur/ Springbed	4	
32	Meja Makan Kayu	1	
34	Meubelair Lainnya	16	
38	Lemari Es	1	
39	AC Split	27	
40	Kipas Angin	5	
41	Kompor Gas (Alat dapur)	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Metro**		
42	Tabung gas	1	
43	Televisi	5	
44	Sondsistem	2	
45	Wireless	1	
56	Unit power supplay	1	
57	Gambar presiden/wakil presiden	3	
58	Tiang bendera	6	
59	Kaca hias	5	
60	Dispenser	3	
62	Palu siding	3	
63	Lambang istansi	1	
64	Gordyn/kray	1	
66	Telefon/pabx	12	
67	Facsibile	1	
68	Finger printer time and attendance acces control system	1	
69	Alat komunikasi digital dan konvensional lainya	1	
70	Unintererupted power supply (UPS)	6	
71	Layar proyektor	1	
72	Internet	1	
73	Computer jaringan lainnya	4	
74	P.C unit	34	
75	Lap top	25	
76	Monitor	1	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Metro		
78	Scanner (Peralatan Personal Komper)	3	
79	Server	2	
80	Router	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Metro		
81	Peralatan jaringan lainnya	1	
82	Alat tenis meja	1	
83	Piala	10	

D. PA Gunung Sugih

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan pada PA Gunung Sugih	
1	Ruang ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Wakil Panitera	-
7	Ruang Kepaniteraan	1
8	Ruang Kesekretariatan	3
9	Ruang Panitera Pengganti	1
10	Ruang Jurusita Pengganti	1
11	Ruang Sidang	2
12	Ruang Pelayanan ptsp	1
13	Ruang kasir	-
14	Ruang Mediasi	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan pada PA Gunung Sugih	
15	Ruang Rapat	1
16	Ruang Perpustakaan	1
17	Ruang Lobi	2
18	Ruang Tunggu	2
19	Ruang Arsip	1
20	Ruang Operator	1
21	Ruang Pantry	1
22	Ruang Gudang	2
23	Ruang Laktasi	1
24	Ruang Posbakum	1
25	Area Bermain Anak	1
26	Area Merokok (Smoking Area)	1
27	Ruang Resepsionis	1
28	Ruang Informasi	-

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Gunung Sugih	
1	Mesin Ketik	-
2	Lemari Kayu	16
3	Filling Kabinet besi	4
4	Brangkas	2
5	CCTV	-
6	Papan Visual/Nama	1
7	Mesin Absensi	-
8	Meja Kerja Kayu	34
9	Kursi Besi/ Metal	98
10	Kursi Kayu	10
11	Sice	6
12	Meja Rapat	4
13	Meja Komputer	6
14	Meja Repsesionis	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Gunung Sugih	
15	Ac Window	-
16	AC Split	22
17	Televisi	4
18	Amplifier	-
19	Loudspeaker	5
20	Wireless	1
21	Tiang Bendera	1
22	Lambang Instansi	2
23	Intermedia Telephone	-
24	UPS	5
25	Komputer	3
26	Laptop	17
27	Sound System	1
28	Printer	13

E. PA Kalianda

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan pada PA Kalianda**	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	2
7	Ruang Perpustakaan	1
8	Ruang Mediasi	1
9	Ruang IT	1
10	Ruang Bendahara	1
11	Ruang Kasubag IT dan Pelaporan	1
12	Ruang Kasubag Umum &Keuangan	1
13	Ruang Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1
14	Ruang Panitera Muda	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan pada PA Kalianda**	
15	Ruang Panitera Pengganti	1
16	Ruang PTSP	1
17	Ruang Posbakum	-
18	Ruang Jurusita	1
19	Ruang Media Center	1
20	Ruang Advocad/ Pengacara	1
21	Tempat Ibadah	1
22	Ruang Gudang	1
23	Ruang Kantin	1
24	Ruang Laktasi	1
25	Ruang Tunggu Sidang	1
26	Toilet	10
27	Ruang Satpam	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Kalianda**	
1	Mesin Ketik Listrik	-
2	Mesin Foto Copy Folio	1
3	Lemari Besi/Metal	5
4	Lemari Kayu	30
5	Rak Kayu	1
6	Filing Cabinet Besi	-
7	Brandkas	1
8	Tabung Pemadam Api	4
9	CCTV	1
10	Papan Visual/Papan Nama	-
11	Mesin Absensi	1
12	Hand Metal Detector	1
13	Portable Generating Genset	1
14	Meja Kerja Kayu	49
15	Kursi Besi/Metal	119
16	Kursi Kayu	10
17	Sice	4
18	Meja Rapat	5
19	Meja Komputer	-
20	Meja Resepsionis	2
21	Kipas Angin	-
22	Alat Pembersih Lainnya	-
23	AC Split	21
24	Televisi	2
25	Ampifier	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Kalianda**	
26	Bangku Panjang Kayu	-
27	Sound System	1
28	Wireless	2
29	Microphone	11
30	Kursi Fiber Glas/Plastik	45
31	Unit Power Suply	5
32	Lemari Es	2
33	Microphone/Wireless Mic	11
34	Hub	1
35	Router	1
36	Telephone PABX	1
37	Pesawat Telephone	1
38	Handy Talky (HT)	-
39	Facsimile	1
40	Local Area Network (LAN)	1
41	Internet	1
42	Komputer Server	2
43	P.C. Unit	36
44	Lap Top	27
45	Desk Info	1
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
48	Server	2
49	Rak Server	2

F. PA Tanggamus

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan**		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	2	
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Ruang IT	1	
9	Ruang Bendahara dan PPK	1	
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	3 kasubag menyatu dalam 1 ruangan
11	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	-	
12	Ruang Kasubag, Perencanaan, IT dan Pelaporan	-	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan**		
13	Ruang Panitera Pengganti	1	
14	Ruang Panitera Muda	1	
15	Ruang Onestop service	1	
16	Mushala	1	
17	Ruang Rapat	-	
18	Ruang Posbakum	1	
19	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	
20	Ruang Arsip	2	
21	Ruang Mediasi	1	
22	Ruang Tunggu	1	
23	Ruang resepsionis	1	
24	Ruang Jurusita	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**	
1	Komputer (PC)	33
2	Server	3
3	Faximile	2
4	Laptop	23
5	Router	1
6	Televisi	1
7	Printer + Copy + Scanner	15
8	Finger Scan (mesin absensi)	1
9	Generator	1
12	CCTV	8
13	Wireless	1
14	Infocus + Layar	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**	
15	Meja Sidang	2
16	Kursi Hakim/ PP	8
17	Bendera	2
18	Kursi Pihak	4
19	Kursi besi/metal	2
20	Palu Sidang	2
21	Alquran	2
29	Handycam	-
30	Infocus	1
31	UPS	1
32	Monitor	1
33	Power suplay	1

G. PA Kotabumi

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan**	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	2
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	2
7	Ruang Perpustakaan Dan TI	1
8	Ruang Bendahara	1
9	Ruang Kepaniteraan	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan**	
10	Ruang Kesekretariataan	2
11	Ruang Kasubbag TI	1
12	Ruang Kordinator Lantai I	1
13	Ruang Kordinator Lantai II	1
14	Ruang One Stop Service	1
15	Ruang Mediasi Dan Advokat	1
16	Ruang Tunggu Sidang	1
17	Ruang Gudang	-
18	Ruang Laktasi	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Tower crane	2	Baik
2	Portabel generating set	1	Baik
3	Stationary water pump	2	Baik
4	Meja kerja kayu	49	47 Baik 2 Rusak Ringan
5	Meja computer	4	3 Baik 1 Rusak Ringan
6	Meja resepsionis	2	1 Baik 1 Rusak Berat
7	Lemari kayu	19	14 Baik 4 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
8	Sice	8	6 Baik 2 Rusak Berat
9	Kursi besi/metal	129	100 Baik 6 Rusak Ringan 23 Rusak

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
			Berat
10	Filing cabinet besi	5	Baik
11	Lambang instansi	2	Baik
12	Kursi kayu	20	8 Baik 12 Rusak Berat
13	Kursi fiber glas/plastik	6	Rusak Berat
14	Karpet	2	Rusak Berat
15	Lambang garuda	1	Baik
16	Meja telepon	4	3 Baik 1 Rusak Ringan
17	Monografi	7	Baik
18	Buku lainnya	18	Baik
19	Lemari Besi/Metal	5	Baik
20	Kursi Dorong	1	Baik
21	CCTV	1	Baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
III	Alat Kantor,Rumah Tangga Dan Perlengkapan Kantor		
1	PC	28	23 Baik 2 Rusak Ringan 3 Rusak Berat
2	Lap top	38	27 Baik 2 Rusak Ringan 9 Rusak Berat
3	Telephone PABX	-	-
4	Komputer jaringan lainnya	5	2 Baik 3 Rusak Berat
5	Internet	1	Baik
6	Scanner	2	Rusak Berat
7	Server	4	2 Baik 2 Rusak Berat
8	Hub	1	Baik
9	Modem	1	Baik
10	External	1	Baik
11	Printer	21	20 Baik 1 Rusak Ringan
12	Facsimile	1	Rusak Ringan
13	Pesawat telephone	14	Rusak Berat
14	AC split	15	9 Baik 3 Rusak Ringan 3 Rusak Berat
15	Audio mixing portable	2	Baik
16	Digital audio taperecorder	1	Rusak Berat

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
III	Alat Kantor,Rumah Tangga Dan Perlengkapan Kantor		
17	Microphone cabel	2	Baik
18	Compack disk player	6	Baik
19	Wireles Mic	8	Rusak Berat
20	Amlpifier	1	Baik
21	Audio Amplifier	1	Baik
22	Palu sidang	3	Baik
23	Brandkas	1	Rusak Berat
24	Mesin absensi	2	1 Baik 1 Rusak Berat
25	Televise	-	-
26	AC Split	15	9 Baik 3 Rusak Ringan 3 Rusak Berat
27	Software	1	Baik
28	Tiang bendera	2	1 Baik 1 Rusak Berat
29	Power Supply	5	Rusak Berat
30	Microphone	-	-
31	LCD Proyektor	1	Baik
32	Cable	60	Rusak Berat
33	Kaca Hias	2	Baik
34	Dispenser	1	Rusak Berat

H. PA Tulang Bawang

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Tulang Bawang**		
1	Ruang Ketua	1	Di Lantai 2 Gedung 2
2	Ruang Wakil Ketua	1	Di Lantai 2 Gedung 1
3	Ruang Sekretaris	1	Di Lantai 2 Gedung 1
4	Ruang Panitera	1	Di Lantai 1 Gedung 1
5	Ruang Sidang I	1	Di Lantai 1 Gedung 1
6	Ruang Sidang II	1	Di Lantai 1 Gedung 2
7	Ruang Mediasi	1	Di Lantai 1 Gedung 1
7	Ruang Kesekretariatan	4	Di Lantai 2 Gedung 1
8	Ruang Kepaniteraan	2	Di Lantai 1 Gedung 1
9	Ruang PTSP	1	Di Lantai 1 Gedung 2

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Tulang Bawang**		
10	Ruang Hakim I	1	Di Lantai 2 Gedung 2
11	Ruang Rapat	1	Di Lantai 2 Gedung 2
12	Ruang Musholla	1	Di Belakang Gedung 2
13	Ruang Perpustakaan	1	Di Lantai 2 Gedung 1
14	Ruang Laktasi	2	Di Lantai 1 Gedung 2
15	Ruang Bermain Anak	1	Di Samping Ruang Tunggu Sidang
16	Ruang Media Center	1	Di Lantai 1 Gedung 2
17	Ruang Brangkas Kasir	1	Di Lantai 1 Gedung 2

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Tulang Bawang**		
1	Lemari Besi/Metal	10	Baik
2	Rak Arsip	2	Baik
3	Lemari Kayu	17	Baik
4	Filing Cabinet Besi	10	Baik
5	Brandkas	2	Baik
6	Buffet	1	Baik
7	Mesin Absensi	1	Baik
	Hand Metal Detector	1	Baik
9	LCD Projector / Infocus	1	Baik
10	Meja Kerja Kayu	53	Baik
11	Kursi Besi/metal	96	Baik
12	Kursi Kayu	19	Baik
13	Sice	4	Baik
14	Bangku panjang kayu	4	Baik
15	Jam Elektronik	5	Baik
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
17	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
18	Lemari Es	1	Baik
19	AC Split	22	Baik
20	TV	4	Baik
21	Tape Recorder	2	Baik
22	UPS	5	Baik
23	Stabilizer	1	Baik
24	Faximile	1	Baik
25	Komputer Jaringan Lainnya	3	Baik
26	PC Unit	22	Baik
27	Laptop	25	Baik
28	Printer	12	Baik
28	Scanner	4	Baik
30	Server	2	Baik
31	Router	2	Baik
32	Rak Server	1	Baik
33	Genset	1	Baik
34	Buku-buku perpustakaan	1106	Baik
35	Penyemprot Tangan/Hand Sprayer	1	Baik
36	CCTV/Camera Control Television System	8	Baik
37	Papan Visual/Papan Nama Jati Ukir	5	Baik
38	Whiteboard	3	Baik
39	Meja Rapat	7	Baik
40	Meja Resepsionis	2	Baik
41	Meja Makan Kayu	1	Baik
42	Kursi Viberglass/Plastik	3	Baik
43	Partisi/Multiplek	2	Baik
44	Lambang Garuda Pancasila	4	Baik
45	Tiang Bendera	2	Baik
46	Kaca Hias	7	Baik
47	Dispenser	3	Baik
48	Palu Sidang	1	Baik

49	Lambang Instansi	1	Baik
50	Karpet Musholla	4	Baik
51	Gorden/Kray	4	Baik
52	Kabel Roll	3	Baik
53	Bingkai Foto	8	Baik
54	HT	10	Baik
55	LAN (Local Area Network)	17	Baik
56	Internet	1	Baik
57	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
58	Monografi	1	Baik
59	Software Komputer	2	Baik

60	Tower Crane	1	Baik
61	Jaringan Distribusi/Listrik	1	Baik
62	TV Ruang Sidang Elektronik	1	Baik
63	Mixer	1	Baik
64	UPS	1	Baik
65	Webcam	1	Baik
66	Speaker	4	Baik
67	Mikrofon	4	Baik

I. PA Krui

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	**Ruangan**	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	1
7	Ruang Kesekretariatan	1
8	Ruang Kepaniteraan	1
9	Ruang PTSP	1
10	Ruang Perpustakaan	1
11	Ruang IT	1
12	Ruang Panitera Pengganti	0
13	Ruang One Stop Service	1
14	Ruang JS / JSP	1
15	Ruang Arsip Perkara	1
16	Mushola	1
17	Gudang	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Meja Kerja Kayu	46	Baik
2	Kursi Kayu	4	Baik
3	Kursi Besi Metal	95	BAik
4	Brankas	2	1 baik 1 rusak berat
5	Sice	7	Baik
6	Meja Resepsionis	1	Baik
7	Kursi Pelastik	36	Rusak berat
8	Pot Bunga	1	Rusak berat
9	Partisi	1	Baik
10	Jam Elektronik	1	Baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
11	Sound System	1	Baik
12	Unit power Supply	9	Baik
13	Stabilisator	1	Rusak Berat
14	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
15	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
16	Tiang Bendera	3	baik
17	Kaca Hias	3	Baik
18	Dispenser	7	6 rusak berat 1 baik
19	Lambang Instansi	2	Baik
20	Karpet	8	Rusak berat
21	Gordyin/Krai	19	Baik
22	Keset Kaki	1	Rusa berat
23	Lemari Kayu	15	4 rusak berat 11 Baik
24	Rak Kayu	4	3 Baik 1 rusak berat
25	Meja Sidang	4	baik
26	Meja Pengacara	0	
27	Kursi Pengacara	0	
28	Kursi Hakim/PP	4	baik
29	Bendera	1	baik
30	Kursi Pihak	2	baik
31	Bangku Pengunjung	10	baik
32	Pagar Pembatas	2	Baik
33	Palu Sidang	1	Baik
34	Alquran	1	Baik
35	Filing Kabinet Besi	2	Baik
36	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik
37	White Board	6	Rusak berat
38	Peta	1	Rusak berat
39	Perforator Besar	1	Rusak berat
40	Kotak Surat	1	baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
41	Perkakas Kantor Lainnya	3	Rusak berat
42	Komputer Jaringan Lainnya	3	baik
43	Peralatan Jaringan Lainnya	1	baik
44	Alat Tenis Meja	1	baik
45	Telephon/Mesin Faximile	2	1 baik 1 rusak berat
46	Server	2	baik
47	Rak Server	1	baik
48	PC	27	baik
49	Switch	0	baik
50	Hub	0	baik
51	Wifi	1	baik
52	Modem	0	
53	Laptop	22	baik
54	Printer	20	baik
55	TV	12	Baik
56	CCTV	1	Baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
57	Kamera	1	Baik
58	Handycam	1	Baik
59	Infocus	1	Baik
60	Scanner	1	baik

J. PA Blambangan Umpu

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan PA Blambangan Umpu	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan PA Blambangan Umpu	
7	Ruang Perpustakaan	1
8	Ruang Bendahara	1
9	Ruang Umum Dan Keuangan	1
10	Ruang Perencanaan IT Dan Pelaporan	1
11	Ruang Kepegawaian Dan Ortala	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran PA Blambangan Umpu	
1	Lemari Kayu	
2	Filing Cabinet Besi	
3	Filing Cabinet Kayu	
4	Brandkas	
5	Tabung Pemadam Api	
6	CCTV	
7	Mesin Absensi	
8	Hand Metal Detector	
9	LCD Projector/Infocus	
10	Meja Kerja Kayu	
11	Kursi Besi/Metal	
12	Kursi Kayu	
13	Sice	
14	Meja Rapat	
15	Meja Resepsionis	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran PA Blambangan Umpu	
16	AC split	
17	Televisi	
18	Power Ampifier	
19	Loudspeaker	
20	Microphone /Wireless MIC	
21	Microphone	
22	Kamera	
23	Internet	
24	P.C. Unit	
25	Lap Top	
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	
27	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	
28	Server	

K. PA Gedong Tataan

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Gedong Tataan**		
1	Ruang Wakil Ketua	1	Kondisi baik
2	Ruang Hakim	1	Kondisi baik
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Kasubbag	1	
6	Ruang Server	1	
7	Ruang Arsip Sekretariatan	1	
8	Ruang Panitera Muda	1	Kondisi baik
9	Ruang Panitera Pengganti	1	
10	Ruang JS/JSP	1	
11	Ruang PTSP	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Gedong Tataan**		
12	Ruang Kasir	1	
13	Ruang Sidang	1	Kondisi baik
14	Ruang Tunggu Sidang	1	Kondisi baik
15	Ruang WC Umum	1	Kondisi baik
16	Ruang Perpustakaan	1	Kondisi baik
17	Ruang Mediasi	1	Kondisi baik
18	Ruang Laktasi	1	Kondisi baik
19	Ruang Posbakum	1	Kondisi baik
20	Ruang Aula	1	Kondisi baik
21	Ruang Arsip Perkara	1	Kondisi baik
22	Mushola Al mahkamah	1	Kondisi baik

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Gedong Tataan**		
1	Komputer PC	14	baik
2	Laptop	18	baik
3	Printer	6	baik
4	AC	9	baik
5	Server	1	baik
6	Komponen Alat Pengolah Data	1	baik
7	Switch Hub	1	baik
8	Meja kerja kayu	13	baik
9	Kursi besi/metal	39	baik
10	Meja Sidang	4	baik
11	Kursi Majelis Hakim	4	baik
12	Kursi Kayu	-	-
13	Lemari Besi /Metal	4	baik
14	Brandkas	2	baik
15	Locker	4	baik
16	CCTV - Camera Control Television System	1	baik
17	Mesin Absensi	1	baik
18	LCD Projector/Infocus	1	baik
19	Sice	1	baik
20	Bangku Panjang Besi/Metal	6	baik
21	Audio Amplifier	1	baik
22	UPS (Unit Power Supply)	5	baik
23	Kursi Dorong	1	baik
24	Komputer Jaringan Lainnya	1	baik
25	Rak Server	1	baik

L. PA Pringsewu

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Pringsewu**		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Panitera Muda	3	
7	Ruang Kasubbag	3	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang JS/JSP	1	
10	Ruang IT/ server dan Arsip Kesekretariatan	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Pringsewu**		
11	Ruang Mediasi	1	
12	Ruang Sidang	1	
13	Ruang Tunggu Sidang	1	
14	Ruang Arsip Kepaniteraan	1	
15	Ruang PTSP	1	
16	Tempat Ibadah	1	
17	Ruang Media Center	1	
18	Toilet	8	
19	Ruang Pojok Baca	1	
20	Ruang Laktasi dan bermain anak	1	
21	Pentri	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Pringsewu**		
1	Papan Nama	1	
2	Brandkas	1	
3	Mesin Absensi	1	
4	Meja Kerja Kayu	81	
5	Kursi Besi/Metal	205	
6	Kursi Kayu	16	
7	Sice	24	
8	Meja Rapat	6	
9	Meja Repsesionis	1	
10	AC Split	5	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Pringsewu**		
11	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	
12	Komputer Jaringan Lainnya	1	
13	P.C. Unit	21	
14	Lap Top	16	
15	Monitor	1	
16	Printer	5	
17	Server	2	
18	Rak server	1	
19	Router	6	
20	Switch	1	

M. PA Mesuji

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Mesuji**		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Kepaniteraan	5	Ruang Panmud, Panmud Hukum, JS, PP dan Kasir
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Kesekretariatan	2	Ruang Umum keuangan dan kepegawaian dan PTIP
8	Ruang Sidang Utama	2	
9	Aula Rapat	1	
10	Ruang Arsip	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
I.	**Ruangan pada PA Mesuji**		
11	Ruang PTSP	1	
12	Ruang E-Court/Gugatan Mandiri	1	
13	Ruang Posbakum	1	
14	Ruang Mediasi dan Kaukus	1	
15	Ruang Server	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Laktasi/Bermain Anak	1	
18	Ruang Tunggu Sidang	1	
19	Ruang Media Center	1	
20	Ruang Tamu/Resepsionis	1	
21	Ruang APM/ZI	1	
22	Pos Keamanan	1	
23	Rumah Genset	1	
24	Tempat Ibadah	1	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Mesuji	
1	Genset	1
2	Komputer PC	22
3	Laptop	17
4	Printer	15
5	Server	2
6	Router	1
7	Rak Server	1
8	Wireless Access Point	5
9	Switch	1
10	Lemari Kayu	11
11	Lemari Besi / Metal	57
12	Rak Besi	3
13	Lemari Display	1
14	Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor lainnya	4
15	Alat Penghancur Kertas	2
16	Mesin Absensi	1
17	Mesin Laminating	1
18	Meja Kerja Besi/Metal	12
19	Meja Kerja Kayu	78
20	Kursi Besi/Metal	143
21	Kursi Kayu	28
22	Sice	23
23	Meja Rapat	2
24	Tempat tidur besi	3
25	Meja Resepsionis	1
26	Kasur/springbad	1
27	Kursi fiber glas/plastic	34
28	Meubelair lainnya	2
29	Jam Mekanis	5
30	Mesin Cuci	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Mesuji	
31	Alat Pembersih lainnya	1
32	Lemari Es	2
33	AC Split	11
34	Mixer	1
35	Loudspeaker	6
36	Sound System	2
37	Microphone	7
38	Lambang Garuda Pancasila	2
39	Tiang Bendera	4
40	Dispenser	8
41	Palu Sidang	2
42	Handy cam	1
43	Bendera Negara	4
44	Bracket Standing Peralatan	1
45	Audio Mixing Console	1
46	Mic Wireless	2
47	UPS	6
48	Digital LED Running Text	1
49	LCD monitor	7
50	Camera Conference	1
51	Mesin Jilid Bundar	1
52	Pesawat Telephone	1
53	Handy Talky	10
54	Facsimilie	1
55	Proyektion Polariscope	1
56	Kamera Digital	2
57	Komputer jaringan lainnya	1
58	Alat tenis meja	1
59	Monografi	3
60	Bangunan Gedung Kantor	1

N. PA Tulang Bawang Tengah

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan pada PA Tulang Bawang Tengah	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Panitera	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Sekretaris	1
5	Ruang Sidang	1
6	Ruang Perpustakaan Dan TI	1
7	Ruang Bendahara	0
8	Ruang Kepaniteraan	1
9	Ruang Kesekretariataan	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan pada PA Tulang Bawang Tengah	
10	Ruang Kasubbag TI	0
11	Ruang Kordinator Lantai I	0
12	Ruang Kordinator Lantai II	0
13	Ruang One Stop Service	1
14	Ruang Mediasi Dan Advokat	1
15	Ruang Tunggu Sidang	1
16	Ruang Gudang	0
17	Ruang Ketua	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Tulang Bawang Tengah		
1	Ups	6	
2	Rak server	1	
3	Stationary water pump	0	
4	Meja kerja kayu	16	
5	KursiDirektur	0	
6	Kursi besi/metal	31	
7	Lambang instansi	1	
8	Kursi kayu	4	
9	Kursi fiber glas/plastic	0	
10	Lambang garuda	1	
11	PC unit	19	
12	Lap top	11	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Tulang Bawang Tengah		
13	Komputer jaringan lainnya	1	
14	Internet	1	
15	Scanner	0	
16	Server	1	
17	Printer	5	
18	Facsimile	0	
19	Pesawat telephone	1	
20	AC split	6	
21	Palu sidang	2	
22	Mesin absensi	1	
23	Tiang bendera	1	
24	Dispenser	0	

O. PA Sukadana

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan pada PA Sukadana	
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Panitera	0
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Sekretaris	0
5	Ruang Sidang	3
6	Ruang Perpustakaan Dan TI	1
7	Ruang Bendahara	0
8	Ruang Kepaniteraan	1
9	Ruang Kesekretariataan	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml
I.	Ruangan pada PA Sukadana	
10	Ruang Kasubbag TI	0
11	Ruang Kordinator Lantai I	0
12	Ruang Kordinator Lantai II	0
13	Ruang One Stop Service	1
14	Ruang Mediasi Dan Advokat	1
15	Ruang Tunggu Sidang	1
16	Ruang Gudang	2
17	Ruang Ketua	1

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Sukadana		
1	Pompa air	1	
2	Mesin Absensi	1	
3	Ac split	16	
4	Meja kerja kayu	90	
5	Lemari kayu	7	
6	Kursi besi/metal	226	
7	Peralatan jaringan lainnya	1	
8	Kursi kayu	12	
9	Kursi fiber glas/plastic	0	
10	Lambang garuda	3	

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jml	Keterangan
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran pada PA Sukadana		
11	PC unit	23	
12	Lap top	29	
13	Komputer jaringan lainnya	1	
14	Palu sidang	3	
15	Scanner	2	
16	Server	2	
17	Power suplay	5	
18	Gambar presiden/wakil presiden	8	
19	Printer	19	

Tabel 4.3. Matriks Kendaraan Dinas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
A.	**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**					
I	**Kendaraan Roda 4**					
3.	Sedan Altis	2014	✓			
4.	Sedan Altis	2006	✓			
5.	Innova G	2013	✓			
6.	Vios	2012	✓			
7.	Grand Livina	2011	✓			
II						
7.	Honda Tiger 3304	2007	✓			
8.	Honda Tiger 6674	2007	✓			
B.	**PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A**					
I.	**Kendaraan Roda 4**					
1.	Sedan Altis	2008		✓		
2.	Kijang Innova E	2015	✓			
3.	Kijang Innova E	2005		✓		
4.	Daihatsu Terrios	2014		✓		
II.	**Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Tiger	2007		✓		
C.	**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**					
I	**Kendaraan Roda 4**					
1	Innova Tipe G	2020	✓			
1.	Innova Tipe E	2006	✓			
2.	Innova Tipe G	2013	✓			Pinjam Pakai dari Pemda Kota Metro
II	**Kendaraan Roda 2**		✓			
1.	GLP III Mega Pro	2005	✓			
D.	**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B**					
I	**Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota Kijang Innova	2006	✓			
2.	Grand Livina	2011		✓		
3.	Toyota Kijang Innova	2017	✓			
II	**Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda GL Pro	2006			✓	
2.	Honda Tiger	2008		✓		
3.	Honda Tiger	2008	✓			
E.	**PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B**					
I	**Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota Kijang Innova E	2006		✓		
2.	Isuzu Panther	2011		✓		
3.	Toyota Innova Reborn G	2017	✓			Pinjam Pakai Pemda Lamsel
II	**Kendaraan Roda 2**					

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Honda GLP III	2005			✓	
2	Honda Tiger	2006		✓		
F.	**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B**					
I	**Kendaraan Roda 4**					
1.	Mobil Kijang Inova	2006	✓			Dari Mahkamah Agung R I
2.	Mobil Kijang Inova	2016	✓			Dari Mahkamah Agung R I
3.	Mobil Sedan Altis	2016	✓			Hibah dari Pemkab Tanggamus
G.	**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota Rush	2015	✓			
2.	Toyota Avanza Tipe G Luxury	2015	✓			
3.	Kijang Innova Type E	2006	✓			
4.	Toyoya Kijang Type LX	2004	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Suzuki Type Smas 115 cc	2010	✓			
2.	Suzuki Type Shogun 125 cc	2007	✓			
H	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota Innova	2006		✓		
2.	Toyota Innova	2018	✓			
3.	Toyota Innova	2021	✓			
II.	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Mega Pro	2005		✓		
2.	Honda Tiger	2006			✓	
I.	**PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1	Toyota Avanza	2015	✓			
2	Toyota Innova E	2005			✓	
3	Suzuki APV	2005			✓	
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1	Honda Mega Pro	2005			✓	
2	Honda Mega Pro	2005			✓	
J.	**PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Innova E	2006		✓		
2.	Isuzu Fanther	2003		✓		
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
2.	Honda Megapro	2005		✓		
3.	Honda Tiger	2008		✓		
5.	Yamaha Yupiter Mx	2011		✓		
K.	**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II**					

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota New Rush	2019	✓			
2.	Toyota Innova	2011	✓			
3.	Toyota Camry	2006	✓			
4.	Toyota Avanza	2009	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Yamaha Vixion	2019	✓			
2.	Yamaha Mio M3	2019	✓			
L.	**PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota Avanza	2018	✓			
2.	Toyota Rush	2019	✓			
3.	Toyota Avanza	2006	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Vario	2019	✓			
2.	Honda Vario	2019	✓			
M.	**PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	APV Arena	2013		✓		Pinjam Pakai Pemda Mesuji
2.	Toyota Rush	2019	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Vario 150 CC	2019	✓			
2.	Honda Vario 125 CC	2019	✓			
3.	Honda Tiger	2019		✓		Transfer Masuk PTA Bandar Lampung
N	**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Daihatsu Terios	2010	✓			
2.	Toyota New Rush	2019	✓			
3.	Toyota Innova	2007	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Yamaha Aerox	2019	✓			
2.	Yamaha Aerox	2019	✓			
3.	Honda Tiger	2007	✓			
O	**PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II**					
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Toyota Rush 1,5 S M/T	2019	✓			
2.	Innova Tipe G	2010	✓			
3.	Suzuki APV DLX MT	2005	✓			
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Yamaha Aerox 155 CC	2018	✓			
2.	Yamaha Soul 125 CC	2018	✓			

Tabel 4.4. Matriks Rumah Dinas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar lampung

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3.	Rumah Dinas Hakim	2	√			
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			
B.	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A					
	NIHIL					
C.	PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A					
1.	Rumah Dinas Ketua	1		V		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		V		
3.	Rumah Dinas Hakim	1		V		
C.	PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			
3.	Rumah Dinas Hakim	1	✓			
D.	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B					
1.	Rumah Dinas Ketua	1		✓		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		✓		
3.	Rumah Dinas Hakim	2		✓		
4.	Rumah Dinas Panitera	1		✓		
5	Rumah Dinas Sekretaris	1		✓		
E.	PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B					
	NIHIL					
F.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B					
	NIHIL					
G.	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II					
	NIHIL					
H.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II					
	NIHIL					
I.	PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik			
3.	Rumah Dinas Sekretaris	1	Baik			
4.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik			
J.	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II					
1.	Rumah Dinas Ketua	1		√		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		√		
4.	Rumah Dinas Panitera	1		√		
K.	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II					
	NIHIL					
L.	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II					
	NIHIL					
M.	PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II					
	NIHIL					
N.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II					
	NIHIL					
K.	PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II					
	NIHIL					

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG

Implementasi E-Court pada Mahkamah Agung membuat aktivitas persidangan dari yang sebelumnya dilakukan secara manual baik dari sisi administratif hingga proses persidangan dan pembacaan putusan, melalui sistem ini serangkaian proses tersebut dikonversi ke dalam bentuk virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

E-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dengan kata lain, pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI, tercakup layanan sebagai berikut dan bisa diakses di situs ecourt.mahkamahagung.go.id:

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
d. E-Litigation (Persidangan secara Online)

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online saat ini dikhususkan untuk advokat.Pengguna terdaftar, setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat di mana advokat disumpah. Adapun pendaftaran dari perseorangan atau badan hokum akan diatur lebih lanjut.

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court.Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

b. Taksiran Panjar Biaya (E-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan nomor pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (multichannel) yang tersedia.

Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-Skum), pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

c. Pemanggilan Pihak secara Online (E-Summons)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.

d. Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik.

Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan, yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

e. e-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-court, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara.Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara.

Pengadilan Agama di Wilayah Lampung telah 100% mengimplementasikan e-court (meliputi 14 Pengadilan Agama). Adapun implementasi e-court pada

Pengadilan Agama sewilayah Lampung, posisi per 31 Desember 202 adalah sebagai berikut :

Tabel Persentase Implementasi E-Court terhadap jumlah perkara

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA (sisa perkara 2020+ perkara msk 2021)	JUMLAH PERKARA ECOURT	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	PA TANJUNG KARANG	16 + 2.336	652	**27.72**
2	PA METRO	782	637	**98.59**
3	PA TANGGAMUS	12 + 1215	982	**80.82**
4	PA GUNUNG SUGIH	3198	2681	**83.83**
5	PA KALIANDA	2517	1261	**50.09**
6	PA KOTABUMI	1.378	687	**49.85**
7	PA TULANG BAWANG	787	234	**29.73**
8	PA KRUI	1+770	106	**14**
9	PA BLAMBANGAN UMPU	240	240	**33.37**
10	PA SUKADANA	2.788	1.900	**68.2**
11	PA GEDONG TATAAN	897	666	**74,24**
12	PA PRINGSEWU	963	886	**108%**
13	PA TULANG BAWANG TENGAH	858	402	**46,85**
14	PA MESUJI	506	149	**29,45**
TOTAL				

Kendala Dalam Pelaksanaan Ecourt yang dialami oleh satuan kerja sewilayah lampung diantaranya :

1. Untuk wilayah satuan kerja yang susah sinyal, masyarakat masih enggan menggunakan e-court, sehingga sementara ini baru advokat saja yang aktif mendaftar perkara melalui e-court;
2. Notifikasi tagihan pembayaran panjar biaya perkara ke Bank memerlukan waktu yang cukup lama;
3. Tidak muncul lagi notifikasi di SIPP saat ada yang mendaftar e-court;

4. Advokat/pendaftar e-court tidak dapat melakuan edit jenis perkara, sehingga apabila perkara tersebut sudah masuk, harus melakukan permohonan pencabutan perkara tersebih dahulu secara berjenjang dari satker lalu ke tingkat banding hingga ke admin pusat.

Atas Prestasinya dalam mengimplementasikan e-court, terdapat beberapa Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang telah berhasil meraih penghargaan "Anugerah Mahkamah Agung RI" Dalam rangkah Ulang Tahun Mahkamah Agung tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 / 2022, Mahkamah Agung telah menetapkan Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2022. Adapun Pengadilan Agama yang telah berhasil mendapat Anugrah MA Tahun 2022 yaitu :

NO.	SATKER	JENIS PENGARGAAN ANUGERAH MAHAKMAH AGUNG RI
1	2	3
1	Pengadilan Agama Gunung Sugih	1. Pengadilan terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi kategori pengadilan agama dengan beban perkara 1001 – 2000. 2. Pengadilan terbaik dalam pelaksanaan kinerja layanan eksekusi putusan kategori pengadilan agama dengan beban perkara 1001 – 2000.
2	Pengadilan Agama Tanggamus	1. Piagam Penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik dalam melaksanakan Mediasi kategori Pengadilan Agama dengan beban Perkara 1001-2500 Tingkat Nasional. 2. Piagam Penghargaan sebagai pengadilan terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Kategori beban perkara 501-1000. 3. Piagam Penghargaan sebagai Pengadilan terbaik dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan dengan beban perkara 501-1000.

2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG.

Impementasi SIPP di Peradilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sudah berjalan lancar. Setiap user aktif menginput SIPP sesuai

kewenangannya.Di sisi aplikasi, SIPP di Peradilan Agama sewilayah sudah terinstal Versi terbaru 4.1.1 seluruhnya.

Implementasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama secara berkala dievaluasi dan dimonitoring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dipublikasikan pada website resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Berikut Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan pada Pengadilan Agama di wilayah Lampung per 24 Desember 2022 :

Tabel Implementasi SIPP pada Pengadilan Agama Sewilayah Lampung

NO	SATKER	USER		BEBAN PERKARA/ PUTUS/ BEBAN MINUTASI/ MINUTASI	PERSENTASE	KINERJA IMPLEMENTASI SIPP
1	2	3		4	6	7
1	PA TANJUNG KARANG	Ketua		Beban Perkara 2.352/ Putus 2.262/ Minutasi 2.262/	96.17	
		Wakil				
		Hakim				
		Kepaniteraan				
2	PA. METRO	Ketua		Beban Perkara 774/ Putus 756/ Beban Minutasi 756/ Minutasi 756	97,67 %	99,11
		Wakil				
		Hakim				
		Kepaniteraan				
3	PA . TANGGAMUS	Ketua	1	1185 perkara	96.60	99.97
		Wakil	1			
		Hakim	4			
		Kepaniteraan	7			
4	PA GUNUNG SUGIH	Ketua	1	3189	99.72	99.72
		Wakil	1			
		Hakim	6			
		Kepaniteraan	5			
5	PA KALIANDA	Ketua	1	Beban Perkara **2503** Perkara Putus / Minutasi **2484**	99.24	99.02 %
		Wakil	1			
		Hakim	5			
		Kepaniteraan	3			
6	PA KOTABUMI	Ketua	1	1.378 / 1.351 /	98, 04	
		Wakil	1			

		Hakim	6	1.351 / 1. 351		
		Kepaniteraan	7			
7	PA TULANG BAWANG	Ketua	1	783	99.49	787
		Wakil	1			
		Hakim	2			
		Kepaniteraan	1			
8	PA KRUI	Ketua	1	Sisa th 2021 1perkara terima th 2022 770 Jumlah 771	99.8%	770
		Wakil	1			
		Hakim	5			
		Kepaniteraan	7			
9	PA BLAMBANGAN UMPU	Ketua	1	Sisa Perkara ahun 2021 + rkara Diterima hun 2022 : 723 rkara Diputus hun 2022 : 720 Sisa Perkara ahun 2022 : 3	100	100
		Wakil	1			
		Hakim	3			
		Kepaniteraan	1			
10	PA SUKADANA	Ketua	1	2788/ 2744/ 2744	98.00	
		Wakil	1			
		Hakim	7			
		Kepaniteraan	4			
11	PA GEDONG TATAAN	Ketua	1	897/887/887/ 887	98,88 %	98.66
		Wakil	1			
		Hakim	2			
		Kepaniteraan	9			
12	PA PRINGSEWU	Ketua	1	963 / 932	96.78% / 100%	98.491 / 126
		Wakil	1			
		Hakim	8			
		Kepaniteraan	9			
13	PA TULANG BAWANG TENGAH	Ketua	1	867/858 858/858	98,96 % 100 %	Sisa tahun lalu : 1 perkara Masuk : 866 perkara Minutasi : 858 perkara Perkara Sisa : 9 Perkara Gugatan : 9 perkara Permohonan : -
		Wakil	1			
		Hakim	2			
		Kepaniteraan	7			
14	PA MESUJI	Ketua	1	506/487	95,3 %	Masuk : 506 Minutasi : 487
		Wakil	1			

		Hakim	1	487/487	100 %	Perkara Sisa : 24 Gugatan 23 Perkara Permohonan 1 Perkara
		Kepaniteraan	5			

Usaha Peradilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam meningkatkan pelayanan publik salah satunya dapat digambarkan dari tabel impementasi SIPP di atas. Kinerja SIPP sebagai gambaran kinerja *core bussiness* pengadilan selalu dipantau oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni dengan dilakukan penilaian setiap minggunya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan Penghargaan kepada satker-satker yang memiliki kinerja SIPP yang berperingkat baik berdasarkan Rapor Penilaian SIPP mingguan yang di rilis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap minggunya. Salah satunya adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yaitu :

NO	SATUAN KERJA	PENGHARGAAN SIPP OLEH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
1	2	3
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	1. Penilaian prestasi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Peringkat 1 Nilai Rata-rata Rapor SIPP Kategori III Periode April s.d Juni 2022 2. Penilaian prestasi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Peringkat 1 Nilai Rata-rata Rapor SIPP Kategori III Periode Juli s.d September 2022
2	Pengadilan Agama Gunung Sugih	3. Penilaian prestasi pada pengadilan agama triwulan 3 ta 2022 peringkat 2. 4. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan oktober 2022 peringkat 5. 5. Rapor penaganan perkara tingkat

		pertama kategori 2 bulan desember 2022 peringkat 7. 6. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan November tgl 25 november 2022 peringkat 6. 7. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan April 2022 peringkat 2. 8. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan Juni 2022 tanggal 3 juni 2022 peringkat 4. 9. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan Juni tanggal 10 Juni 2022 peringkat 3. 10. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan Juni tanggal 22 Juni 2022 rangking 4. 11. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan Februari tanggal 25 Februari 2022 peringkat 3. 12. Rapor penaganan perkara tingkat pertama kategori 2 bulan Maret tanggal 4 maret 2022 peringkat 6
3	Pengadilan Agama Tanggamus	1. A**, Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2. Peringkat II, Nilai Rata-rata SIPP Kategori IV Priode Januari s/d Maret 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia; 3. Peringkat I, Nilai Rata-rata SIPP Kategori IV Priode Juli s.d September 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) telah diterapkan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan seluruh Pengadilan Agama pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sejak tahun 2017. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sendiri telah meraih predikat "A" *exellent* selama 3 tahun berturut turut yaitu 2019, 2020 dan 2021. Namun, untuk tahun 2022 dengan dikeluarkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkmah Agung Republik Indoneisa Nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Perubahan Kegiatan Asesmen APM Tahun 2022, bahwa pelaksanaan Asessemen APM Tahun 2022 dinyatakan tidak diperlukan lagi. Sedangkan data/eviden yang telah diunggah oleh satuan kerja pada aplikasi PMPAPMZI agar dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi peradilan ataupun sebagai bahan evaluasi pembangunan Zona Integritas. Selain itu gambaran keberhasilan Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 terdapat 12 satker yang memperoleh predikat "A" *Exellent* dan 2 satker lainnya yang memperoleh nilai "B". Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 seluruh 14 satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah meraih predikat "A" *Excellent*.

Dengan adanya surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 4046/DjA/OT.01.1/9/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama MA RI tahun 2022 maka kegiatan APM tahun 2022 di tiadakan



- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berpegang dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:1403.b/ DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Peradilan Agama, Maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melakukan perbaikan terus menerus untuk memenuhi standar PTSP yang telah ditetapkan. Baik perbaikan fisik maupun peningkatan layanan dan *upgrade knowledge* para petugas dan pejabat yang berwenang. Sebagai satker Pembina bagi Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukumnya pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melalui berbagai kesempatan selalu memotivasi dan mendorong seluruh satuan kerja Pengadilan Agama pada wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk meningkatkan pelayanan, fungsi dan tampilan Pelayanan Satu Pintu. Berikut kami sampaikan gambaran keadaan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan tinggi Agama Bandar Lampung.

Tabel 5.1

Gambaran keadaan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan tinggi Agama Bandar Lampung

No	Satker	Tahun			Foto PTSP
		2020	2021	2022	
1	Pengadilan Agama Tanjung Karang	100%	100%	100%	

2	Pengadilan Agama Metro	100%	100%	100%	
3	Pengadilan Agama Kalianda	100%	100%	100%	
4	Pengadilan Agama Gunung Sugih	100%	100%	100%	
5	Pengadilan Agama Tanggamus	98,3%	100%	100%	

					
6	Pengadilan Agama Krui	96,39%	97,22%	97,22%	
7	Pengadilan Agama Kotabumi	97,9%	97,9%	97,9%	
8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	93,00%	93,00%	93,00%	

9	Pengadilan Agama Belambangan Umpu	96,6%	100%	100%	
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	88,00%	91,00%	91,00%	
11	Pengadilan Agama Sukadana	93,00%	93,20%	93,20%	
12	Pengadilan Agama Pringsewu	90,00%	97,00%	97,00%	

					
13	Pengadilan Agama ulang Bawang Tengah	73,00%	88,00%	88,00%	
14	Pengadilan Agama Mesuji	85,14%	97,08%	97,08%	

- INOVASI PELAYANAN PUBLIK

  Dengan pembangunan Zona Integritas yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung secara terus menerus dan berkesinambungan semenjak dilakukan pencanangan Zona Integritas pada 28 Maret tahun 2019 yang cukup memberikan stimulasi berbagai kreativitas aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sehingga muncullah berbagai inovasi yang berbasis teknologi maupun kebijakan

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh *stake holder* Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Atas kerja keras dan upaya seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021.







Berikut adalah 10 Inovasi yang berhasil dilahirkan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sepanjang tahun 2020-2022.

1. Sipecut (Sistem Informsi Pelayanan Cuti)



Sub bagian kepegawaian dan TI sebagai bagian dari PTA Bandar Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan, namun dalam pelaksanaanya mengalami berbagai kendala diantaranya dalam memberikan pelayanan cuti bagi hakim dan pegawai. Pelayanan cuti yang belum baik dibuktikan dengan seringnya bagian kepegawaian menerima keluhan Hakim dan pengawai yang mengajukan cuti setiap bulannya. Jika penanganan cuti tidak segera diperbaiki maka dikhawatirkan akan semakin banyak keluhan dari Hakim dan Pegawai sehingga tidak menutup kemungkinan bagian kepegawaian akan menuai banyak protes belum lagi kegaduhan yang timbul karena adanya perbedaan jumlah sisa cuti hal ini tentu saja akan mengganggu kesehatan dari sebuah organisasi., oleh karena itu dalam rangka mewujudkan misi kedua PTA Bandar Lampung yaitu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan bagian kepegawaian meningkatkan pelayanan pengajuan cuti dengan membuat Aplikasi Sistim Pengajuan Cuti yang kemudian diberi nama Si Pecut.

Beberapa hal yang dapat diatasi dengan adanya inovasi SI PECUT:

1. Form Pengajuan cuti yang pengajuannya melalui bagian umum seringkali hilang.
2. Keterlambatan permohonan cuti dan pegawai.
3. Perbedaan sisa cuti antara pegawai dan pengelola cuti.

Penerima manfaat

Seluruh aparatur Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

2. Sibudi (Sistem Buku Tamu Digital)



Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pengadilan tingkat banding yang memiliki tugas pokok mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Penagdilan Agama, menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memiliki stakeholder yang beragam. Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang kini sudah terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdapat beberapa kendala diantaranya sulitnya merekam data pengguna layanan/tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Disamping itu, sesuai SK KMA Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, bahwa setiap penerima layanan informasi harus mengisi formulir permohonan informasi terlebih dahulu sebelum menerima layanan informasi, hal ini sulit dilakukan secara konsisten karena dipandang sangat tidak praktis bagi pengguna layanan. Sistem buku tamu manual juga menyebabkan sering terlambatnya pembuatan laporan permohonan informasi dan laporan pengaduan, begitu juga dengan pelaksanaan survey harian yang sulit dihitung dan direkap. Dengan adanya aplikasi SIBUDI diharapkan dapat mengefektifkan perekaman data pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP yang meliputi : Layanan Pengaduan, Layanan Informasi, Layanan Surat Masuk Kepaniteraan dan Kesekretariatan, hingga pengelolaan datanya menjadi suatu laporan yang dapat digunakan untuk laporan bulanan ataupun menunjang peningkatan pelayanan publik Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

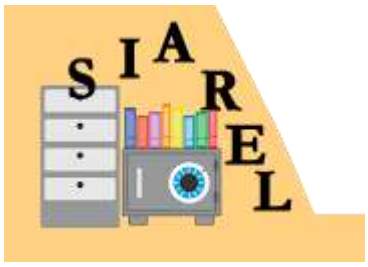
Beberapa hal yang dapat diatasi dengan adanya inovasi SIBUDI :

1. Semula perekaman data tamu dilakukan secara Manual dan jarang difungsikan/tidak digunakan secara maksimal
2. Pemohon informasi tidak perlu lagi mengisi formulir permohonan informasi secara manual
3. Sulitnya dilakukan rekapitulasi dan pelaporan bulanan
4. Sulitnya melakukan survey harian dan
5. Sulitnya mendapatkan Informasi latar belakang mengenai stakeholder

Penerima manfaat

Seluruh Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

3. Siarel (Sistem Informasi Arsip Elektronik)



Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu tuntutan di era modern. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008). Untuk mewujudkan keterbukaan informasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menyediakan Website Resmi dengan alamat *pta-bandarlampung.go.id* sebagai media penyelenggaraan informasi publik dengan jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan informasi publik tersebut sering menghadapi kendala khususnya saat website harus diperbaharui tampilannya agar lebih menarik, saat harus mengikuti template tampilan website standar nasional, ataupun saat harus mengikuti zaman dan content management system (CMS) atau framework versi terbaru. Saat dilakukan redesign tersebut seringkali

administrator web merasa kesulitan untuk melakukan backup data elektronik (pdf) yang telah diupload secara rutin setiap bulannya atau setiap tahunnya selama penyelenggaraan website. Tak jarang pada akhirnya saat melakukan redesain website, administrator harus mengupload ulang seluruh e-doc tersebut, hal ini sangat tidak efektif disamping dimungkinkannya ada kebocoran data ataupun data corrupt/hilang saat proses backup dilakukan

Dengan adanya SIAREL diharapkan website dapat lebih leluasa mengikuti perkembangan zaman dan tampilan interface di luarnya namun tetap aman dan terselamatkan data-datanya.

Beberapa hal yang dapat diatasi dengan adanya inovasi SIAREL :

1. Mengamankan data dokumen elektronik website resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Mempermudah pencarian data dokumen elektronik.
3. Mengefektifkan pengarsipan karena diklasifikasi berdasarkan jenis dokumen.

Penerima manfaat

Seluruh pengguna website Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

4. Sipetir (Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Terukur)



Latar Belakang Sub bagian kepegawaian dan TI sebagai bagian dari PTA Bandar Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan, namun dalam pelaksanaanya mengalami berbagai kendala diantaranya dalam penyusunan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan dan SKP/Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk melaksanakan Penilaian Capaian Kinerja Pegawai bulanan yang harus terkoneksi dengan Perjanjian Kinerja Individu, banyak pegawai yang merasa sulit untuk dilakukan penyusunannnya secara manual (mengisi formulir menggunakan excel).

Sedangkan Penilaian Capaian Kinerja bulanan menjadi salah satu indikator besaran pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang harus disusun tepat waktu (maksimal hari terakhir bulan berjalan) (Surat Edaran SEKMA Nomor 9 Tahun 2020). Begitu juga dengan penyusunan SKP/PPKP setiap akhir tahun, pegawai harus menghimpun terlebih dahulu jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan selama setahun dan sering kali disusun tidak tepat waktu. Jika permasalahan Penilaian Capaian Kinerja dan SKP/PPKP ini tidak segera diperbaiki maka dikhawatirkan kinerja pegawai secara individu akan semakin menurun, daya saing menurun karena reward berbasis kinerja menjadi tidak berjalan efektif. Punishment pun sulit ditegakkan karena penilaian perilaku dan realisasi SKP/PPKP masih belum dilakukan oleh atasan langsung.

Beberapa hal yang dapat diatasi dengan adanya inovasi SIPETIR:

1. Sulitnya penyusunan PKP yang terkoneksi dengan Perjanjian Kinerja Individu yang semula dilakukan manual (excel)
2. Belum dilakukan penilaian yang objektif oleh atasan langsung secara langsung.
3. Atasan sulit melakukan monitoring apabila capaian kinerja dilakukan secara manual.
4. Banyak penyusunan yang seharusnya dilakukan secara mandiri, masih melibatkan dan ketergantungan dengan pegawai yang lain ataupun analis kepegawaian sehingga menyebabkan keterlambatan pengumpulan dokumen.

Penerima manfaat

1. Seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan
2. Seluruh aparatur Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

5. SIPERADING (Sistem Percepatan Perkara Banding)

Inovasi ini dibuat dilatarbelakangi dengan adanya evaluasi kinerja pada tahun 2020 diketahui kinerja Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menyelesaikan sebanyak 47 perkara, waktu penyelesaiannya terdapat



beberapa perkara yang sampai lebih dari 2 (dua) bulan bahkan ada yang sampai 90 hari, jika dirata-rata penyelesaian perkara tahun 2020 adalah 33 hari. Dalam rangka peningkatan pelayanan perkara banding pada tahun 2021, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung membuat kebijakan untuk membuat SOP inovasi percepatan penyelesaian perkara banding atau disebut SIPPERADING yaitu SOP tentang percepatan penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan waktu penyelesaiannya maksimal adalah 30 hari (satu bulan). Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memberikan pedoman dalam bentuk SOP penyelesaian perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam waktu maksimal 30 hari (satu bulan). Dampak yang diharapkan adalah masayarakat mendapat pelayanan lebih cepat dan segera mendapat kepastian hukum. Inovasi SIPPERADING ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Surat Keputusan No. WB-A/517/HK.05/1/2021 tanggal, 15 Januari 2021

6. E-binwas (Elektronik Pembinaan dan Pengawasan)



Latar belakang dibangunnya aplikasi ini adalah karena sulitnya memonitoring Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari satker Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Di samping itu, Pengadilan Tingkat Pertama pun pernah beberapa kali kesulitan menemukan Laporan Hasil Pembinaan/Pengawasan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari satker itu sendiri baik berupa hardcopy maupun softcopy. Menjadi suatu kesulitan ketika Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ataupun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang merupakan arsip PTA Bandar Lampung yang telah dijilid harus discan ulang untuk kemudian diserahkan kembali kepada Pengadilan Tingkat Pertama. Selama ini pengarsipan Laporan

Hasil Pengawasan maupun Lapoan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencarian pun tentunya akan memakan waktu lebih lama.. Salah satu Aplikasi yang menjadi Inovasi Core Bussiness Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini diberi nama e-Binwas (elektronik Pembinaan dan Pengawasan) bertujuan untuk memudahkan dalam pengarsipan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP). Di samping itu harapannya kedepan pembinaan dan pengawasan dapat secara kontinu dimonitoring sehingga meminimalisir temuan berulang sehingga dapat meningkatkan kinerja satuan kerja secara menyeluruh. Aplikasi eBinwas menyediakan 2 (dua) jenis user yaitu : admin tingkat banding dan admin tingkat pertama

7. e- brosur (Elektronik Brosur)

Adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ingin meningkatkan pelayanan publik dengan mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Inovasi ini diberi nama e-brosur yang tujuannya memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Agama, terutama mengenai alur/cara proses perkara banding, pengaduan, layanan informasi serta biaya perkara banding. Beberapa hal yang dapat diatasi dengan adanya inovasi E-BROSUR: Masyarakat yang mencari informasi tentang Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung lebih cepat terlayani dan informasinya lengkap. Adapun cara penggunaannya:

1. Instal aplikasi scanner barcode
2. Setelah terinstal, buka aplikasi scanner barcode
3. Kemudian templekan dibagian barcode yang ingin dibuka.
4. Maka akan tampil informasi yang dibutuhkan
5. Selesai.

Penerima manfaat

Seluruh pengguna Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

8. Sibosan (Sistem Barcode Salinan Putusan)

Latar belakang inovasi ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ingin meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi khususnya di bidang administrasi kepaniteraan. Bahwa selama ini pengarsipan salinan putusan perkara banding yang dikirim ke pengadilan pengaju disampaikan menggunakan CD dalam penyimpanan soft file salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dari beberapa pengalaman pengiriman tersebut terdapat kelemahan yaitu waktu dikirim sampai di pengadilan pengaju CD pecah, ketika dibuka ternyata tidak terbaca dan berbiaya. Dengan alasan tersebut, maka dibuat inovasi penyimpanan softfile salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dikirim melalui sistem barcode. Inovasi ini diberi nama SI-BOSAN (Sistem Barcode Salinan Putusan) yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengarsipan salinan putusan perkara banding yang akan dikirim ke pengadilan pengaju, dan bermanfaat meminimalisir penggunaan biaya perkara serta memudahkan penyimpanan dan membuka arsip salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Inovasi ini telah berjalan mulai dari perkara No 11/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. sampai perkara No 40/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. pengiriman salinan putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ke pengadilan pengaju telah disertai barcode. Penerima manfaat

1. Pihak Berperkara yang mengajukan upaya hukum banding
2. Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
3. Pengacara yang beracara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas pokok danfungsinya yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja secara berkala.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Tujuan dari pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Pelaksanaan pengawasan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah dilakukan dengan beberapa upaya yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Fungsi Pengawasan meliputi : a) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya. c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pengawasan melekat meliputi kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif sesuai dengan PERMA NO 7 Tahun 2016 tentang penegakan dispilin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan PERMA NO 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Obyek Pembinaan dan Pengawasan

Pada dasarnya pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh baik bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan yaitu, manajemen peradilan dan kinerja Pelayanan Publik, administrasi Perkara, Administrasi persidangan, administrasi umum dan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang pelaksanannya untuk dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang, sedangkan untuk Pembinaan dan Pengasawan kepada Satuan Kerja yang ada di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dengan Surat keputusan ang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Bahan Pembinaan dan Pengawasan

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- SEMA No. 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.
- PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim;
- PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan;
- PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

- Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- Buku-buku register perkara Penyelenggaraan perkara secara elektronik.
- Buku-buku Pengelolaan keuangan perkara secara elektonik.
- Berkas Perkara
- Inovasi Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I.
- Data-data lain yang terkait dengan pengawasan.

Waktu dan Tempat

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh TIM Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung terhadap 14 satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dimulai awal tahun yang dilaksanakan mulai tanggal 09 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022, pengawasan kedua dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus 2022 s/d 30 Agusrus 2022. Selain Pembinaan dan Pengawasan secara langsung juga dilaksanakan secara Virtual (online) yang dilaksanakan mulai tanggal 04 Oktober 2022 s/d 17 November 2022.

Kemudian untuk meningkatkan kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sesuai dengan Surat Perintah Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor W8-A/2455/KP. 01.1/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang pelaksanaan Pengawasan Bidang telah dilaksanakan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 31 oktober 2022, yang hasil pengawasannya dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai koordinartor Pengawasan.

Tim Pembinaan dan Pengawasan

Untuk mewujudkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Ketua Pengadilan TinggiAgama Bandarlampung telah mengeluarkan :

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor W8-A/445/PS.01/2/2022 tanggal 15 Februari 2022, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya jadwal pembinaan dan pengawasan.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor W8-A/1391/PS.01/6/2022 tanggal 28 Juni 2022, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya jadwal pembinaan dan pengawasan
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor : W8-A/2182/PS.01/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukkan Koordinator, Asisten Koordinator Binwasbid, Asisten Koordinator Wilayah, Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas daerah, Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Asisten HATIBINWASDA Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.
- Surat Perintah Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor W8-A/2455/KP.01.1/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang pelaksanaan Pengawasan Bidang.

Saran dan Tindak Lanjut

Masing-masing Tim Pemeriksa diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender harus sudah membuat dan melaporkan hasil dari pemeriksaandalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung selaku koordinator pembinaan dan pengawasan untuk ditelaah secara seksama. Hasil telaah wakil ketua disusun dalam bentukkesimpulan hasil pemeriksaan dan selanjutnya di laporkan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Sumber Dana Pelaksanaan

Sumber dana pengawasan tahun 2022 adalah DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2022, mengingat dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2022, maka pengawasan reguler terhadap Pengadilan Agama dilakukan dua kali dalam setahun, pelaksanaan pengawasan melalui virtual/zoom meeting terhadap pengadilan agama yang dilaksanakan pada bulan Otober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

B. Evaluasi

Hasil Pengawasan

Evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan, yang merupakan bagaian dari sistim kerja manajemen yang berfungsi untuk melihat,memperhatikan dan menilai kinerja yang telah dilakukan berdasarkan program yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya evaluasi sering dilakukan dengan cara monitoring, karena itu dalam praktik pelaksanaan disebut “Monev” (Monitoring dan evaluasi).

Dari evaluasi atau monitoring dapat diketahui secara langsung hal-hal apa yang telah dicapai dan apa saja yang belum kemudian terhadap yang belum tersebjut dicari penyebab/kendala dan jalan kelaurnya untuk dilakukan pembenahan dan atau perbaikan segera mungkin. Dalam Praktik pembinaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan dari Baswas MA RI ada **Kriteria** yaitu dasar aturan yang melandasi pelaksanaan suatu program kerja, kemudian ada **Rekomendasi** yaitu jalan keluar untuk bagaiman pekerjaan yang belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi terdapat kesalahan/kekeliruan itu dibuat atau diperbaiki sesuai dengan Kriteria.

Pelaksaanaan pembinaan dan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2022 sudah dilaksanakan pada tanggal pada bulan November 2022, Sedangakan monitoring dan evaluasi untuk semua Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadialan Tinggi Agama Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik sebagaimana jadwal kegiatan pembinaan dan pengawasan serta monitoring yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan tinggi Agama bandarlampung.

Sebagai pertanggung jawaban dari suatu tugas pekerjaan khususunya **monitoring dan evaluasi** terhadap Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah dibuat LAPORAN HASIl MONITORING oleh masing-masing Tim dan telah di laporkan kepada pimpinan Pengadilan

Tinggi Agama Bandar Lampung. Demikian juga semua Pengadilan Agama sudah membuat LAPORAN TINDAK LANJUT dari Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan telah disamapaikan laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dan temuan hasil pengawasan pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah diinvetarisir dan disusun oleh Wakil Ketua menjadi bahan rapat evaluasi dan koordinasi.

Hasil Pembinaan

Evaluasi merupakan bagian dari sisitem kerja Setelah selesai melakukan pengawasan,tim menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) dan hasil temuan tersebut diekspose dihadapan seluruh pejabat dan staf pengadilan agama yang diawasi. Ternyata hasil temuan tersebut mendapat sambutan positif dan kesanggupan untuk menindak lanjuti temuan Tim.

Selama kurun waktu tahun 2022 ada beberapa prestasi yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung antara lain :

1. Penangan Perkara Pada Tingkat Banding berdasar SIPP.

Prestasi penangan perkara dari bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung selalu berada pada urutan raking I dengan penyelesaian tidak ada sisa perkara, emuanya dapat diselesaikan tewpat waktu di tahun 2022.

Tabel SIPP

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA PERADILAN AGAMA BERDASAR SIPP PERIODE JUM`AT, 07 JAN. 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN					Kategori
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Sisban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Sisban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Sisban Upload Putusan	Nilai Akhir	Ranking	
1	PTA MATARAM	1	1	12	29	4	2	2	2	100	100	100	100	1	III
2	PTA SURABAYA	1	1	15	30	30	0	0	0	0	0	0	0	-	III
3	PTA BANDUNG	1	1	12	19	12	0	0	0	0	0	0	0	-	III
4	PTA SEMARANG	1	1	15	26	11	0	0	0	0	0	0	0	-	III
5	PTA JAKARTA	1	1	22	29	10	0	0	0	0	0	0	0	-	III
6	PTA PALEMBANG	1	1	5	13	6	0	0	0	0	0	0	0	-	III
7	PTA BANTEN	1	1	11	15	5	0	0	0	0	0	0	0	-	III
8	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	4	0	0	0	0	0	0	0	-	III
9	PTA BANJARMASIN	1	1	11	9	3	0	0	0	0	0	0	0	-	III
10	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	3	0	0	0	0	0	0	0	-	III
11	PTA SAMARINDA	1	1	12	10	3	0	0	0	0	0	0	0	-	III
12	MS ACEH	1	0	11	16	2	0	0	0	0	0	0	0	-	III
13	PTA PALANGKARAYA	1	1	11	7	2	0	0	0	0	0	0	0	-	III
14	PTA AMBON	1	1	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	-	III
15	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	2	0	0	0	0	0	0	0	-	III
16	PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	-	III
17	PTA KENDARI	1	1	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	-	III
18	PTA MANADO	1	1	6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	-	III
19	PTA PONTIANAK	1	1	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	-	III
20	PTA PADANG	1	1	8	16	1	0	0	0	0	0	0	0	-	III
21	PTA JAYAPURA	1	1	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	-	III

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 25 MARET 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SURABAYA	1	1	15	20	189	117	117	117	95.214	100	100	98.405	1

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	15	26	99	92	92	92	100	100	100	100	1
2	PTA JAKARTA	1	1	22	29	62	51	51	51	100	100	100	100	1
3	PTA BANDUNG	1	1	12	18	90	74	74	74	98.378	100	100	99.459	2
4	MS ACEH	1	0	11	16	53	44	44	44	97.273	99.091	100	98.788	3

3. Kategori III (<= 50 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	36	29	29	29	100	100	100	100	1
2	PTA BANTEN	1	1	11	15	34	28	28	28	100	100	100	100	1
3	PTA MEDAN	1	1	10	18	28	21	21	21	100	100	100	100	1
4	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	22	19	19	19	100	100	100	100	1
5	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	21	19	19	19	100	100	100	100	1

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 29 APRIL 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SURABAYA	1	1	15	20	193	175	175	175	95.314	100	100	98.438	1

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	15	26	147	136	136	136	100	100	100	100	1
2	PTA JAKARTA	1	1	22	29	84	76	76	76	100	100	100	100	1
3	PTA BANDUNG	1	1	12	18	110	112	112	112	98.571	100	100	99.524	2
4	MS ACEH	1	0	11	16	70	66	66	66	97.576	100	100	99.192	3
5	PTA MAKASSAR	1	1	10	29	56	51	51	51	96.863	100	100	98.954	4

3. Kategori III (<= 50 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	47	42	42	42	100	100	100	100	1
2	PTA MEDAN	1	1	10	18	47	36	36	36	100	100	100	100	1
3	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	29	26	26	26	100	100	100	100	1
4	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	26	26	26	26	100	100	100	100	1

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 27 MEI 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	15	29	182	182	182	182	99.753	100	100	99.918	1
2	PTA SURABAYA	1	1	16	20	223	191	191	191	98.797	100	99.476	98.394	2

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA JAKARTA	1	1	22	29	102	86	86	86	100	100	100	100	1
2	PTA MEDAN	1	1	10	18	91	90	90	90	100	100	100	100	1
3	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	52	47	47	47	100	100	100	100	1
4	PTA BANTEN	1	1	11	15	53	46	46	46	99.13	100	100	99.71	2
5	MS ACEH	1	0	11	16	86	73	73	73	97.808	100	100	99.268	3
6	PTA MATARAM	1	1	12	29	69	69	69	69	97.561	100	100	99.184	4
7	PTA BANDUNG	1	1	12	18	143	121	121	121	97.355	100	100	99.118	5
8	PTA MAKASSAR	1	1	10	29	96	96	96	96	97.143	100	100	99.048	6

3. Kategori III (<= 50 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	36	30	30	30	100	100	100	100	1
2	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	29	29	29	29	100	100	100	100	1
3	PTA BANJARMASIN	1	1	11	9	30	27	27	27	100	100	100	100	1
4	PTA PADANG	1	1	9	16	29	26	26	26	100	100	100	100	1
5	PTA PALEMBANG	1	1	5	13	27	24	24	24	100	100	100	100	1
6	PTA KENDARI	1	1	10	7	16	16	16	16	100	100	100	100	1
7	PTA PONTIANAK	1	1	9	8	16	12	12	12	100	100	100	100	1

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 24 JUNI 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	16	26	216	202	202	202	99.406	100	100	99.802	1
2	PTA SURABAYA	1	1	15	20	279	239	238	238	96.387	100	100	98.796	2
3	PTA BANDUNG	1	1	12	18	176	145	145	145	96	100	100	98.667	3

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA JAKARTA	1	1	22	29	118	112	112	112	100	100	100	100	1
2	PTA MEDAN	1	1	10	18	73	64	64	64	100	100	100	100	1
3	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	61	54	54	54	100	100	100	100	1
4	PTA BANTEN	1	1	11	15	66	55	55	55	99.273	100	100	99.758	2
5	MS ACEH	1	0	11	16	101	91	91	91	98.242	100	100	99.414	3
6	PTA MATARAM	1	1	12	24	79	59	59	59	97.966	100	100	99.322	4
7	PTA MAKASSAR	1	1	10	29	79	67	67	67	97.612	100	100	99.204	5

3. Kategori III (<= 50 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	38	37	37	37	100	100	100	100	1
2	PTA BANJARMASIN	1	1	11	9	37	36	36	36	100	100	100	100	1
3	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	34	33	33	33	100	100	100	100	1
4	PTA PALEMBANG	1	1	5	13	31	30	30	30	100	100	100	100	1
5	PTA PADANG	1	1	8	16	30	28	28	28	100	100	100	100	1

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 29 JULI 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	16	26	265	246	246	246	99.613	100	100	99.837	1
2	PTA BANDUNG	1	1	12	16	205	195	195	195	95.795	99.59	100	98.462	2
3	PTA SURABAYA	1	1	15	20	315	285	285	285	94.526	100	100	98.175	3

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	18	77	76	76	76	100	100	100	100	1
2	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	70	66	66	66	100	100	100	100	1
3	PTA JAKARTA	1	1	22	28	142	134	134	134	99.701	100	100	99.9	2
4	PTA BANTEN	1	1	11	15	79	71	71	71	99.437	100	100	99.812	3
5	MS ACEH	1	0	11	16	114	106	106	106	98.113	100	100	99.371	4
6	PTA MAKASSAR	1	1	10	29	87	81	81	81	98.025	100	100	99.342	5
7	PTA MATARAM	1	1	12	28	94	79	79	79	96.962	100	100	98.987	6

3. Kategori III (<= 50 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	46	44	44	44	100	100	100	100	1
2	PTA BANJARMASIN	1	1	11	9	39	39	39	39	100	100	100	100	1
3	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	39	37	37	37	100	100	100	100	1

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 26 AGUSTUS 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA JAKARTA	1	1	22	29	158	149	149	149	99.732	100	100	99.911	1
2	PTA SEMARANG	1	1	15	26	302	276	276	276	99.275	100	100	99.758	2
3	PTA BANDUNG	1	1	12	18	244	219	219	219	95.525	99.635	100	98.387	3
4	PTA SURABAYA	1	1	15	20	351	330	330	330	94.606	100	100	98.202	4

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	18	88	82	82	82	100	100	100	100	1
2	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	75	70	70	70	100	100	100	100	1
3	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	94	47	47	47	100	100	100	100	1
4	PTA BANTEN	1	1	11	15	83	80	80	80	99.5	100	100	99.833	2
5	MS ACEH	1	0	11	16	129	120	120	120	98.333	100	100	99.444	3
6	PTA MAKASSAR	1	1	10	29	102	91	91	91	98.242	100	100	99.414	4
7	PTA MATARAM	1	1	12	25	58	54	54	54	94.681	100	100	98.227	5

3. Kategori III (<= 50 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	47	44	44	44	100	100	100	100	1

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 30 SEPTEMBER 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA JAKARTA	1	1	22	29	173	165	165	165	99.273	100	100	99.758	1
2	PTA SEMARANG	1	1	15	26	342	317	317	317	99.117	100	100	99.706	2
3	PTA SURABAYA	1	1	15	20	400	367	367	367	94.005	100	100	98.002	3
4	PTA BANDUNG	1	1	12	18	272	261	261	261	93.87	99.693	100	97.854	4

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	18	117	107	107	107	100	100	100	100	1
2	PTA PEKANBARU	1	1	5	20	81	79	79	79	100	100	100	100	1
3	PTA YOGYAKARTA	1	1	16	11	60	57	57	57	100	100	100	100	1
4	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	9	14	52	51	51	51	100	100	100	100	1
5	PTA BANTEN	1	1	11	15	101	93	93	93	99.57	100	100	99.857	2
6	PTA MAKASSAR	1	1	10	29	128	111	111	111	98.559	100	100	99.52	3
7	MS ACEH	1	0	11	16	142	132	132	132	98.485	100	100	99.495	4
8	PTA MATARAM	1	1	12	29	106	104	104	104	93.654	100	100	97.885	5

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 28 OKTOBER 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	15	30	373	359	359	359	99.22	100	100	99.74	1
2	PTA JAKARTA	1	1	18	31	190	184	184	184	98.804	100	100	99.601	2
3	MS ACEH	1	1	10	18	152	147	147	147	98.639	100	100	99.546	3
4	PTA SURABAYA	1	1	20	21	453	419	419	420	94.749	100	100	98.25	4
5	PTA BANDUNG	1	1	16	19	297	286	286	286	94.406	99.72	100	98.042	5

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	19	133	129	129	129	100	100	100	100	1
2	PTA PEKANBARU	1	1	12	19	88	84	84	84	100	100	100	100	1
3	PTA YOGYAKARTA	1	1	15	13	69	63	63	63	100	100	100	100	1
4	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	14	15	56	54	54	54	100	100	100	100	1
5	PTA BANJARMASIN	1	1	13	12	52	49	49	49	100	100	100	100	1
6	PTA PALEMBANG	1	1	10	15	51	44	44	44	100	100	100	100	1
7	PTA BANTEN	1	1	12	16	108	106	106	106	99.623	100	100	99.874	2
8	PTA SAMARINDA	1	1	10	12	52	50	50	50	99.2	100	100	99.733	3
9	PTA MAKASSAR	1	1	17	30	144	130	130	130	98.769	100	100	99.59	4
10	PTA PADANG	1	1	10	16	54	50	50	50	98.4	100	100	99.467	5
11	PTA MATARAM	1	1	11	22	119	113	113	113	94.169	100	100	98.053	6

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 18 NOVEMBER 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	15	30	408	387	387	387	99.276	100	100	99.758	1
2	PTA MAKASSAR	1	1	17	30	159	145	145	145	98.897	100	100	99.632	2
3	MS ACEH	1	1	10	18	173	166	166	166	98.71	100	100	99.57	3
4	PTA JAKARTA	1	1	18	31	203	193	193	193	98.446	100	100	99.482	4
5	PTA SURABAYA	1	1	20	21	482	459	459	460	94.858	100	100	98.286	5
6	PTA BANDUNG	1	1	16	19	316	305	305	305	94.764	99.738	100	98.164	6

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	19	139	138	138	138	100	100	100	100	1
2	PTA PEKANBARU	1	1	12	19	95	90	90	90	100	100	100	100	1
3	PTA YOGYAKARTA	1	1	15	13	74	69	69	69	100	100	100	100	1
4	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	14	15	61	57	57	57	100	100	100	100	1
5	PTA PALEMBANG	1	1	10	15	59	52	52	52	100	100	100	100	1
6	PTA BANJARMASIN	1	1	13	12	59	53	53	53	100	100	100	100	1
7	PTA BANTEN	1	1	12	16	110	108	108	108	99.63	100	100	99.877	2
8	PTA SAMARINDA	1	1	10	12	52	52	52	52	99.231	100	100	99.744	3
9	PTA PADANG	1	1	10	16	68	56	56	56	97.857	100	100	99.286	4
10	PTA MATARAM	1	1	11	22	127	122	122	122	94.89	100	100	98.197	5

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 02 DESEMBER 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA SEMARANG	1	1	15	30	422	405	405	405	99.309	100	100	99.77	1
2	PTA MAKASSAR	1	1	17	30	164	154	154	154	98.961	100	100	99.654	2
3	MS ACEH	1	1	10	18	167	168	168	168	98.81	100	100	99.603	3
4	PTA JAKARTA	1	1	18	31	212	203	203	203	98.622	100	100	99.507	4
5	PTA SURABAYA	1	1	20	21	502	476	476	477	94.958	100	100	98.319	5
6	PTA BANDUNG	1	1	16	19	330	317	317	317	94.953	99.748	100	98.234	6

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	19	144	139	139	139	100	100	100	100	1
2	PTA PEKANBARU	1	1	12	19	100	93	93	93	100	100	100	100	1
3	PTA YOGYAKARTA	1	1	15	13	76	74	74	74	100	100	100	100	1
4	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	14	15	61	58	58	58	100	100	100	100	1
5	PTA BANJARMASIN	1	1	13	12	58	53	53	53	100	100	100	100	1
6	PTA PALEMBANG	1	1	10	15	63	56	56	56	99.206	100	100	99.762	2
7	PTA BANTEN	1	1	12	16	112	109	109	109	99.633	99.633	100	99.755	3
8	PTA SAMARINDA	1	1	10	12	58	52	52	52	99.231	100	100	99.744	4
9	PTA PADANG	1	1	10	16	62	57	57	57	97.895	100	100	99.298	5
10	PTA MATARAM	1	1	11	22	134	126	126	126	94.72	100	100	98.24	6

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING BERDASAR SIPP PERIODE JUM'AT 30 DESEMBER 2022

RAPOR PENANGANAN PERKARA TINGKAT BANDING

1. Kategori I (> 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA MEDAN	1	1	10	19	152	152	152	152	100	100	100	100	1
2	PTA SEMARANG	1	1	15	30	454	454	454	454	99.251	100	100	99.75	2
3	PTA MAKASSAR	1	1	17	30	180	180	180	180	99.111	100	100	99.704	3
4	MS ACEH	1	1	10	18	196	196	196	196	98.98	100	100	99.66	4
5	PTA JAKARTA	1	1	16	31	225	225	225	225	98.667	100	100	99.556	5
6	PTA SURABAYA	1	1	20	21	526	526	526	527	95.323	100	100	98.441	6
7	PTA BANDUNG	1	1	16	19	361	358	358	358	95.363	99.777	100	98.38	7

2. Kategori II (51 - 150 PERKARA)

No	Satuan Kerja	DATA								PENILAIAN				
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi	Minutasi Tahun Ini	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PTA PEKANBARU	1	1	12	19	108	108	108	108	100	100	100	100	1
2	PTA YOGYAKARTA	1	1	15	13	79	79	79	79	100	100	100	100	1
3	PTA BANDAR LAMPUNG	1	1	14	15	63	63	63	63	100	100	100	100	1
4	PTA BANJARMASIN	1	1	13	12	57	57	57	57	100	100	100	100	1
5	PTA PALEMBANG	1	1	10	15	66	66	66	66	99.394	100	100	99.798	2
6	PTA SAMARINDA	1	1	10	12	63	63	63	63	99.365	100	100	99.788	3
7	PTA BANTEN	1	1	12	16	116	116	116	116	99.655	99.655	100	99.77	4
8	PTA PADANG	1	1	10	16	66	66	66	66	98.182	100	100	99.394	5
9	PTA MATARAM	1	1	11	32	137	137	137	137	94.891	100	100	98.297	6

2. Prestasi Laporan KeuanganTingkat UAPPA-W TAHUN 2021.

Dalam bidang Laporan Keuangan, Pengadilan Tinggi Agama bandarlampung berhasil meraih Prestasi Terbaik Peingkat I Kategori Satker Besar dalam lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, yang dianugerahkan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung



3. Prestasi Perorangan Mewakili Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Dalam bidang Diklat kepegawaian yang dilaksananan oleh Menpin Diklat Litbang MA RI, diperoleh Peringkat Terbaik I Pengajar Mualan Lokal Angkatan 4 Tanggal 24 s/d 28 Januari 2022 atas nama **Yosinaldo Syarief** Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.


SERTIFIKAT



Kemudian prestasi yang diraih pada tahun 2022 oleh Pengadilan Agama yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung antara lain :

1. Pengadilan Agama Tanggamus Pringkat 2 Nasional Nilai rata-rata Raport SIPP katagori IV Triwulan 1 Priode Januari s/d Maret 2022



2. Penangan Perkara Pada Tingkat Pertama berdasar SIPP. Prestasi penangan perkara dari bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 yang diraih oleh Pengadilan Agama Sukdana dengan Ranking 7 Nasional kategori II (2.501-5.000)
3. Penangan Perkara Pada Tingkat Pertama berdasar SIPP. Prestasi penangan perkara dari bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 yang diraih oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Ranking 8 Nasional kategori II (2.501- 5.000)



4. Penangan Perkara Pada Tingkat Pertama berdasar SIPP. Prestasi penangan perkara dari bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 yang diraih oleh Pengadilan Agama Tanggamus Sugih dengan Ranking 4 Nasional kategori III (1.001- 2.500)



5. Penangan Perkara Pada Tingkat Pertama berdasar SIPP. Prestasi penangan perkara dari bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 yang diraih oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Ranking 1 Nasional kategori IV(251-1.000)
6. Penangan Perkara Pada Tingkat Pertama berdasar SIPP. Prestasi penangan perkara dari bulan Januari 2022 s/d bulan Desember 2022 yang diraih oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Ranking 1 Nasional kategori IV(251-1.000)



C. Nilai SKM dan IPK Pengadialn Tinggi Agama Bandar lampung

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melakukan **Survey Kepuasasan masyarakat (SKM)** dengan niali **3,71** masuk kategori sangat baik dan **Indek Presepsi Korupsi (IPK)** dengan nilai **3.90** masuk pada kategori Bersih dari korupsi





Analisis

Berimplikasi pada jumlah hari yang disediakan untuk pengawasan telah banyak menghasilkan temuan yang perlu ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja. Keterbatasan waktu pengawasan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak terkoreksi, maka diperlukan adanya kebijakan pimpinan untuk mengintensifkan untuk melakukan pengawasan jarak jauh yang dapat dilakukan setiap saat, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan IT.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung terus berinovasi dalam membuat aplikasi penunjang kinerja yang dapat mengontrol setiap saat pelaksaan tugas di Pengadilan Agama.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Komitmen dari tim pengawas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan semangat kebersamaan dilandasi dengan kerja keras dan kerja cerdas, dan kerja tuntas, dengan disrrtai sikap ikhlas, maka akan menghasilkan output dan outcame yang luar biasa, menuju peradilan yang modern yang berkelas dunia.

Sedangkan yang menjadi penghambatnya adalah anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2022 yang terbatas, serta masih adanya situasi pandemi Copid 19 yang masih belum tuntas, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan masih ada hambatan yang harus disiasati dengan berbagai innovasi dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan 14 Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.
2. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berhasil mempertahankan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) yang telah diraih pada tahun 2021.
3. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2022 telah mencapai 100% dengan rincian perkara yang diterima sebanyak 63 perkara dan jumlah perkara yang putus sebanyak 63 perkara, sedangkan pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung jumlah sisa tahun 2021 sebanyak 54 perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 19.636 perkara dan jumlah perkara yang putus sebanyak 18.757 perkara sehingga tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah 95%.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terhadap Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dan mampu melakukan pengawasan diseluruh satuan kerja di wilayah hukumnya, namun perlu dilakukan optimalisasi pada kualitas output dan outcome dari pengawasan yang dilaksanakan, sehingga setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan mampu mengarahkan satuan kerja yang diawasi kearah yang lebih baik.

5. Hampir seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengalami kekurangan pegawai diantaranya yaitu tenaga teknis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti serta staf kesekretariatan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian perkara yang hampir menyentuh angka dua puluh ribu perkara dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
6. Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama (SAPM) telah mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memperoleh Setifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “A“ (Excellent) sedangkan 14 Pengadilan Agama di bawahnya mendapatkan dengan nilai “A” (Excellent), meskipun tahun ini tidak ada lagi penilaian akreditasi dari Dirjen Badilag.
7. Anggaran dan Sarana/Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung masih kurang memadai dan sesuai kebutuhan satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan para pengambil kebijakan dalam penyusunan baseline anggaran dimasa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengingat volume penambahan pegawai saat ini tidak seimbang dengan volume pegawai yang pensiun dan tingginya jumlah perkara yang harus diselesaikan.
2. Perlu kajian lebih dalam dan musyawarah oleh seluruh pihak terkait baik Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mencari solusi karena terjadi peningkatan sisa perkara yang cukup signifikan hampir di seluruh

Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar hal ini dapat diantisipasi pada masa yang akan dating.

3. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dibawahnya perlu dialokasikan belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, diantaranya yaitu pembebasan lahan yang saat ini masih menjadi milik satuan kerja lain untuk dijadikan lahan parkir Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sehingga kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ke depan semakin baik.
4. Perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan/pengawasan secara berkala dan berkesinambungan serta tepat sasaran dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pembangunan gedung satker baru (Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah) sehingga diharapkan pembangunan gedung yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan *prototype* gedung kantor pengadilan, baik dari segi waktu maupun kualitasnya. Pada akhirnya hal tersebut tentu akan sangat mendukung kinerja pimpinan dan aparatur lainnya.
5. Perlu memberikan dorongan yang lebih kepada seluruh satuan kerja baik Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun Pengadilan Agama yang berada diwilayahnya untuk melakukan pembangunan Zona Integritas, yang bukan hanya formalitas namun totalilas dalam rangka merubah *mindset dan culture-set* seluruh aparatur agar menjadi aparatur yang berkontribusi dalam memberantas birokrasi negatif menuju birokrasi yang bersih, yang pada akhirnya akan berkontribusi untuk mewujudkan *good governance*. Usulan pembentukan Pengadilan Agama Pesisir Barat dan Kenaikan kelas Pengadilan Agama yang ada di Lampung dari kelas IB ke kelas IA dan dari Kelas II ke kelas IB telah diajukan kepada pihak terkait sehingga diharapkan kedepannya dapat dimonitoring dan di follow-up progressnya.